



VOLUME XIII / NO. 127 / APRIL 2018

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

MELINDUNGI NEGARA DARI NARKOBA

Para sindikat narkoba boleh jadi mengatur berbagai siasat. Namun semua celah masuk bagi para penyelundup telah diperketat. Aparat keamanan RI bersiaga mengawasi wilayah Indonesia di darat, laut, dan udara. Saatnya Indonesia merdeka terhadap narkoba.



Daftar Isi



5	DARI LAPANGAN BANTENG
6	EKSPOSUR
10	LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA	
15	Musuh Utama Itu Bernama Narkoba
18	Infografis
20	Tak Gamang Menghadang Narkoba
23	Penguatan Organisasi dan Upaya Penegahan
25	Bea Cukai Sigap Hadang Narkoba

WAWANCARA	
27	Sekarang Waktunya Nabung Saham
POTRET KANTOR	
30	Itjen Modern Berbasis Teknologi Informasi

FIGUR	
32	Wanita Tangguh Berhati Teguh

EKONOMI TERKINI	
36	Perlu Genjot Ekspor dan Investasi

KOLOM EKONOM	
40	APBN yang Inklusif dan Berkelanjutan
GENERASI EMAS	
44	Mimpi yang Menjadi Nyata
OPINI	
46	Peluang Ekonomi Industri Sepak Bola Nasional

REGULASI	
48	Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan Untuk Perpajakan Diperkuat
INSPIRASI	
50	Fokus Mengajar Pelajar Sekolah Marjinal

RENUNGAN	
52	Motivasi Lewat Apresiasi

BUKU	
53	Nostalgia Keluarga Cemara

JALAN-JALAN	
54	Kampung Sepakbola Tulehu: Pencetak Pemain Handal

SELEBRITI	
56	Seni Peran dan Komunikasi



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

Ralat Majalah Media Keuangan Volume XIII / No. 126 / Maret 2018. **Halaman 11** tertulis "PKN STAN Goes to Village", seharusnya "Cerdas Cermat Dana Desa KPPN Rengat". **Halaman 13** tertulis "Kemenkeu Mengadakan Executive Gathering 2018, sharusnya "PKN STAN Goes to Village. Mohon maaf atas kesalahan ini.

Indonesia Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Tahunan International Monetary Fund-World Bank Group 2018

Pertemuan terbesar tahunan di bidang Ekonomi dan Keuangan

Nusa Dua-Bali,
8-14 Oktober 2018

Manfaat:



Penerimaan devisa dari kehadiran
+15.000 peserta dari **189** negara



Meningkatkan **REPUTASI** dimana Indonesia akan semakin dipercaya dalam menyelenggarakan kegiatan berskala internasional



Makin dikenalnya produk Indonesia di pasar Internasional dan meningkatnya **PELUANG INVESTASI** serta transaksi **PERDAGANGAN**



TRANSFER PENGETAHUAN melalui **+2.000** pertemuan isu perekonomian terkini dan penyelenggaraan pertemuan internasional.



Meningkatnya kunjungan **WISATAWAN** mancanegara ke Indonesia

www.am2018bali.go.id

The 2018 IMF-WBG Annual Meetings Bali
 @am2018bali
 @am_2018_bali
 2018 IMF-WBG Annual Meetings Bali

Dari Lapangan Banteng

Memerangi Narkoba

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya telah menjadi ancaman nasional yang sangat berbahaya. Penangkapan kapal pembawa narkoba dalam jumlah 1,6 ton lebih di Kepulauan Riau pada bulan Februari 2018 lalu telah membuka mata kita semua bahwa kegiatan ini sudah mengancam negara kita. Tercatat sampai dengan Maret 2018 ini, DJBC berhasil menindak 80 kasus penyelundupan narkoba, dengan total sabu 2,876 ton. Jumlah yang fantastis.

Dapat dibayangkan apabila narkoba ini berhasil masuk ke Indonesia, maka akan sangat banyak sekali generasi muda Indonesia yang menjadi tidak berguna. Penangkapan yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bekerja sama dengan Polri, TNI, dan BNN sudah selayaknya mendapatkan apresiasi karena telah

menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.

Selain pendidikan, kesehatan adalah modal utama bagi para penerus bangsa untuk dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Generasi yang sehat haruslah bebas dari narkoba. Generasi yang cerdas harus bebas dari jeratan berbagai obat dan candu yang membuat mereka menjadi lemah dan sakit-sakitan. Bonus demografi akan sia-sia apabila generasi emas penerus bangsa rapuh tiada daya.

Di sini, fungsi DJBC yang berada di bawah Kementerian Keuangan sangat penting. Salah satu tugas DJBC adalah menjaga perbatasan Indonesia dari masuknya barang-barang terlarang dan ilegal dari luar negeri. Mengingat luas lautan di Indonesia lebih banyak daripada daratan, tugas ini sangat berat apabila harus dikerjakan sendiri. Koordinasi dan sinergi dengan berbagai

instansi Kementerian dan Lembaga harus selalu dilakukan agar dapat optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk penanganan narkoba, DJBC bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga yang baru berganti pucuk pimpinan ini, selain melakukan tindakan penangkapan juga melakukan hal yang tidak kalah penting, yaitu pencegahan. Fungsi ini yang tidak dimiliki oleh DJBC sehingga perlu untuk dibantu oleh BNN. Pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda harus terus dilakukan. Dengan pengetahuan dan informasi yang memadai tentang bahaya narkoba, akan membuat benteng yang kokoh bagi masyarakat dalam memerangi narkoba.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
@kemenkeuRI

@KemenkeuRI @BeacukaiRI bekerjasama dgn @DivHumas_Polri @Puspen_TNI @INFOBNN awal Februari lalu berhasil gagalkan penyelundupan narkoba seberat lebih dari 1 ton. Ini merupakan capaian terbesar pemerintah awal tahun 2018 dalam #PerangiNarkoba
Sampaikan apresiasi dan pesan optimis #temankeu terhadap upaya pemerintah dalam melakukan upaya #PerangiNarkoba

@olipowlyn

Salut akan sinergitas BeaCukai, Polri, TNI, dan BNN dalam pencegahan peredaran gelap narkotika. Terus #PerangiNarkoba. Generasi muda juga harus mampu menjaga kesehatan diri sendiri dengan #TolakNarkoba Teguh pendirian dan berakal sehat

@singgihazwar

Cegah penyalahgunaan narkoba dengan pengetahuan yang benar dari mulai keluarga-masyarakat-pemerintah tidak rumit dalam pelaksanaannya.

@tata_tiyok

saya harap BeaCukai dan semua jajaran yg terlibat dlm #PerangiNarkoba senantiasa diberi kemudahan kesabaran dan tdk berputus asa utk terus mengungkap dan menangkap para pengedar/penyelundup segala jenis narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia.

Masa depan pemuda-pemudi Indonesia akan terselamatkan seiring dengan keberhasilan BeaCukai, Polri, TNI, dan BNN dalam memberantas penyebaran narkotika.



www.kemenkeu.go.id



KemenkeuRI



@KemenkeuRI



KemenkeuRI



KemenkeuRI



majalahmediakeuangan



Keragaman Indonesia dalam Goresan Kanvas

Pameran seni mural “Voyage To Indonesia Art Exhibition” menampilkan “Wall of Connections” berupa 14 kanvas dengan berbagai ukuran yang dikerjakan oleh delapan pelukis. Kegiatan ini menjadi bagian dari penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 untuk mempromosikan keanekaragaman budaya Indonesia. Rencananya hasil karya seni ini akan dipamerkan di jalur penghubung antara gedung IMF-World Bank Group pada acara Spring Meetings di Washington, DC pada April 2018. Pameran berlangsung pada 12-14 Maret 2018 di Gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan.

Foto
Irfan bayu



Karnaval Karawo Gorontalo

Provinsi Gorontalo tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, tetapi juga memiliki kain khas Gorontalo yang disebut Karawo. Salah satu cara mempopulerkan kain tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengadakan Karnaval Karawo Gorontalo. Pada tahun 2017, tema Karnaval Karawo Gorontalo adalah kupu-kupu dan burung. Karnaval tersebut diikuti oleh instansi pemerintah yang berada di provinsi tersebut, juga diikuti oleh desainer dari Jember, Tomohon, dan Bandung.

Foto dan teks
Edy Santoso



26/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro Pers
Setpres

Presiden Jokowi Melaporkan SPT Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 Secara Elektronik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, (26/02). "Hari ini saya melaporkan SPT tahunan pajak melalui e-filing. Caranya mudah, tidak perlu ke kantor pajak, bisa di mana saja, kapan saja dan saya sudah mendapatkan bukti penerimaan elektroniknya," ujar Presiden. Presiden sempat menyebutkan bahwa semua data yang diperlukan telah tercantum di kolom *e-filing* yang dia isi melalui tabletnya.

Dikutip dari rilis resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, menurut Presiden, penyampaian SPT secara elektronik memberikan kemudahan kepada para pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. "Caranya mudah, tidak perlu ke kantor pajak, bisa di mana

saja, kapan saja. Enggak pagi, enggak siang, enggak malam, bisa semuanya," ucap Presiden. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta melaporkan SPT-nya masing-masing hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Saat melakukan pengisian SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017, Presiden didampingi oleh Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Kepala KPP Pratama Surakarta Eko Budi Setyono. Di musim penyampaian SPT Tahunan ini, Direktorat Jenderal Pajak mengampanyekan kepada masyarakat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara elektronik melalui *e-Filing*. *E-Filing* ini adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara daring dan waktu nyata melalui internet pada laman <https://djponline.pajak.go.id> atau *Application Service Provider* (ASP).

27/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Menkeu dan Direktur Pelaksana IMF menjadi Narasumber pada High Level International Conference

International Monetary Fund (IMF) dan Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan *High Level International Conference* dengan tema "New Growth Models in a Changing Global Landscape" di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa, (27/02). Konferensi tersebut merupakan salah satu kegiatan utama dalam persiapan pertemuan tahunan IMF-World Bank Group Oktober 2018 di Bali. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia tidak hanya berfokus pada level pertumbuhan tetapi juga kualitas pertumbuhan. "Ketika kita menaikkan tingkat kehidupan mereka, terbuka kesempatan investasi dan perdagangan sehingga pertumbuhan dapat meningkat," jelas Menkeu. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan bahwa IMF sangat mendukung dan juga merupakan suatu kehormatan untuk bekerja sama dengan Indonesia yang untuk pertama kalinya akan mengadakan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Indonesia.



28/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Memberikan Sambutan Acara Lelang Sukarela Koleksi Pribadi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan pada acara Lelang Sukarela sejumlah koleksi pribadi milik beberapa pejabat negara di Galeri Nasional, Jakarta pada Rabu (28/02). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan 110 Tahun Lelang Indonesia. Menkeu menekankan bahwa hasil dari lelang ini akan disumbangkan untuk kepentingan sosial melalui Yayasan Yappika Actionaid. "Saya tegaskan lelang ini adalah barang pribadi. *Proceednya* nanti akan disumbangkan untuk sosial, salah satunya yaitu untuk perbaikan sekolah yang rusak. Saya tegaskan uang ini bukan uang APBN. APBN kita tetap aman," tegas Menkeu.

02/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kemenkeu Jalin MoU dengan BPS dan BSSN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) tentang penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data dan/atau informasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), serta MoU dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengenai perlindungan informasi dan transaksi elektronik bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan pada Jumat (02/03). Menurut Menkeu, MoU dengan BPS dilakukan untuk pengoptimalan pengelolaan data, perlu mengadopsi teknologi digital. "Ini tambang baru. Dulu orang katakan yang sebabkan orang jadi kaya karena kuasai tambang minyak, gas, atau yang berasal dari *nature resource*. Pada era digital yang disebut tambang adalah tambang data. Tapi tentu data yang kita olah dan pahami," jelasnya.



Kuliah Umum Menkeu di Universitas Pattimura Ambon dan Universitas Khairun Ternate

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan rangkaian kegiatan ke Kota Ambon dan Ternate-Tidore pada Rabu (07/03) dan Kamis (08/03). Salah satu kegiatan Menkeu dikota tersebut adalah memberikan kuliah umum di Universitas Pattimura, Ambon dan di Universitas Khairun Ternate. Menkeu berpesan kepada para mahasiswa untuk membuat pilihan yang baik dalam menghadapi kemajuan teknologi. Setiap orang memiliki akses yang luas, namun menurut Menkeu yang membedakan adalah kemampuan memilih informasi yang baik dan buruk. “Teknologi bisa menjadi akses untuk *progress* tapi dia juga bisa menjadi distrupsi dan membuat anda *degress*. Anda bisa maju karena *opportunity*-nya banyak tapi Anda bisa juga mundur bahkan di-*destroy* dengan teknologi,” pesan Menkeu.



07/03

Teks
Biro KLI

Foto
Bliiro KLI

13/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Apresiasi dan Penghargaan Wajib Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara Apresiasi & Penghargaan Wajib Pajak (WP) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar Tahun 2018 di Aula Lantai 2 Gedung Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat DJP Jakarta, Selasa (13/03). Penghargaan ini diberikan atas kontribusi para wajib pajak atas pencapaian target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar di tahun 2017. "Terima kasih, selamat dan penghargaan kepada seluruh wajib pajak yang pada hari ini diundang hadir untuk mendapatkan penghargaan dari Dirjen Pajak dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar untuk kewajiban pajaknya tahun 2017. Kontribusi yang diberikan dari para wajib pajak ini adalah sangat signifikan bagi keseluruhan penerimaan negara kita," kata Menkeu membuka *keynote speech*nya.

13/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Peresmian Voyage to Indonesia: Art Exhibition

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meresmikan Voyage To Indonesia: *Art Exhibition* yang diselenggarakan di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan, di Jakarta pada Selasa (13/03). Menkeu menyatakan pentingnya mengenalkan kemajemukan masyarakat Indonesia yang mampu bersinergi mencapai tujuan bersama ke seluruh dunia melalui rangkaian acara Voyage to Indonesia menuju International Monetary Fund (IMF) – *World Bank Group (WBG) Annual Meetings 2018* yang akan diselenggarakan di Bali tanggal 8-14 Oktober 2018. “Jadi seluruh event ini ditujukan supaya pertama tidak hanya seolah-olah pertemuan IMF-World Bank itu hanya untuk IMF-World Bank, tapi untuk 189 anggotanya. Dan kita dari panitia nasional ingin juga mengikutsertakan seluruh masyarakat didalam ikut menyambut IMF-World Bank ini didalam rangka untuk menciptakan kesan terhadap Republik Indonesia sebagai suatu negara yang luar biasa *multi-dimension*,” kata Menkeu.



14/03

Teks
Tim PFM-MDTF

Foto
Tim PFM-MDTF

PFM MDTF Mengadakan Management Committee Meeting Pertama Tahun 2018

Tim *Public Financial Management Multi-Donor Trust Fund (PFM-MDTF)* menggelar acara Rapat *Management Committe (MC Meeting)* yang diselenggarakan bersama para donor yaitu Pemerintah Kanada, Uni Eropa dan Swiss. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu (14/03) bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Rapat dibuka oleh Plt. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Arif Baharudin selaku Ketua GOI-MCR, dan dihadiri oleh para pihak penerima manfaat PFM-MDTF II. Dalam rapat dibahas mengenai dana perwalian yang akan dikucurkan dari para donor untuk menunjang kegiatan para pihak sepanjang tahun 2018 hingga 2019 guna peningkatan manajemen keuangan publik yang akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat perekonomian dan kepercayaan masyarakat pada pembangunan yang saat ini sedang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia.

18/03

Teks
Biro KLI

Foto
DJP

Pengisian E-Billing dan E-Filling pada Spectaxcular 2018

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo memberikan sambutan pada acara Spectaxcular 2018 untuk kampanye pengisian *E-Billing* dan *E-Filing*. Acara yang digelar atas kerjasama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Telkomsel ini diselenggarakan pada Minggu (18/03) di area Park and Ride Thamrin 10, Jakarta. “Pada hari ini kita akan merayakan Spectaxcular 2018. Saya ingatkan bersama bahwa SPT pajak orang pribadi apakah sudah diisi? Paling lambat 31 Maret. Makin cepat makin baik dan isi yang benar, jujur, semuanya sesuai dengan kenyataan. Itu saja mengingatkan bahwa nanti SPT-nya setelah diisi dan jangan lupa dibayar,” pesan Wamenkeu. Pada acara Spectaxcular 2018 ini, DJP melakukan layanan pajak berupa layanan aktivasi EFIN dan asistensi E-Filling hanya untuk wajib pajak orang pribadi, Cetak ulang NPWP, Create Kode Billing, dan Konsultasi perpajakan.





MUSUH UTAMA ITU BERNAMA NARKOBA

Perang terhadap narkoba sudah dikobarkan sejak zaman kolonial. Narkoba (narkotika dan obat berbahaya) pada zaman dahulu lebih dikenal dengan jenis candu. Candu yang dihisap dengan pipa panjang kebanyakan dinikmati oleh masyarakat Tionghoa. Pemerintah Belanda melegalkan tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu atau morfin dan

melakukan pengadaan yang dibenarkan undang-undang (*Verdoovende Middelen Ordonantie* 1927).

Ketika pemerintah Jepang menginjakkan kaki di Indonesia, candu menjadi terlarang. Undang-undang yang semula melegalkan konsumsi candu pun dihapuskan. Namun demikian, penggunaan narkoba di kalangan masyarakat justru semakin meningkat. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.9 tahun 1976 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut, secara lengkap diatur mengenai peredaran gelap, rehabilitasi, dan sebagainya.

Patroli laut
Bea dan Cukai
semakin
diperkuat demi
pengawasan
yang lebih
optimal

Foto
Dok. DJBC



PSO BC di Tanjung Balai Karimun berandil besar dalam memberantas narkoba

Foto Dok. DJBC

Indonesia Darurat Narkoba

Pernyataan “Indonesia Darurat Narkoba” telah dilontarkan Presiden Jokowi sejak Februari 2015 dalam acara Rakornas Pemberantasan Narkoba di Jakarta. Ungkapan ini disampaikan Presiden setelah menelaah hasil survei dalam Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2014.

Berdasarkan survei yang diadakan atas kerja sama BNN dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2014, terungkap bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 4 juta lebih. Kerugian yang dialami negara mencapai Rp63 triliun per tahun, sedangkan angka kematian di Indonesia mencapai 30-40 orang per hari.

Berdasarkan kondisi darurat tersebut, BNN menegaskan tidak boleh ada ego sektoral untuk memberantas narkoba di Indonesia. Seluruh aparat pemerintah beserta masyarakat harus mewaspadai ancaman narkoba yang merusak generasi bangsa. Data dari BNN mengungkapkan, penyalahgunaan narkoba meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2017, terhitung BNN telah mengungkap 46.537 kasus narkoba dengan mengamankan 58.365 orang tersangka.

Sindikat penuh muslihat

Sejak lama, pemerintah Indonesia mengincar sindikat narkoba di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya berasal dari luar Indonesia. Dalam Laporan Kinerja BNN tahun 2017, jaringan sindikat narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) baik individu maupun kelompok yang melakukan perencanaan dan aktivitas ilegal di lebih dari satu wilayah atau negara.

Peran yang dilakukan jaringan sindikat narkoba pun bermacam-macam. Kelompok pelaku yang terorganisir tersebut berperan sebagai penyandang dana, pemilik narkoba, produsen, pengendali, bandar besar, bandar, penjual/pengedar, dan kurir

yang berhasil diungkap. Dalam laporan tersebut diungkapkan ada 99 jaringan narkoba di Indonesia.

Saat ditemui Media Keuangan pada pertengahan Maret, Kepala Bagian Humas BNN Kombes Pol. Sulistiandriatmoko mengungkapkan, “Para sindikat narkoba sudah mengetahui peta kelemahan dan celah untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia.” Ada tiga alasan utama mengapa Indonesia menjadi pasar potensial bagi para sindikat narkoba.

Pertama, para sindikat memahami dengan baik bahwa permintaan (*demand*) Indonesia terhadap pasokan narkoba sangat besar. Sehingga berapa pun banyaknya narkoba yang mereka suplai pasti akan terserap. Kedua, wilayah perairan Indonesia sangat terbuka mengingat dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan.

Ketiga, konsistensi penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Hukuman mati pun tidak membuat mereka jera. Bahkan dari balik lembaga pemasyarakatan, para tahanan narkoba tersebut masih menggerakkan sindikat jaringannya.

Lebih jauh, Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Muhammad Mustofa, mengungkapkan bahwa ada skenario besar untuk membuat Indonesia lemah. Hal ini dikarenakan ada kekhawatiran Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan besar secara ekonomi, industri, dan militer. Maka bisa dikatakan bila Indonesia kini sedang mendapat ancaman nyata melalui bahaya narkoba.

Jalur laut menjadi primadona

Sepanjang pemberantasan narkoba di Indonesia, narkoba diketahui masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur darat, laut, dan udara. “Setiap pintu masuk baik udara maupun laut harus terus-menerus diwaspadai. Khususnya jalur laut yang banyak dilakukan ke jalur tidak resmi yang secara faktual tidak ada petugas penegakan hukum yang ditempatkan di sana,” jelas Mustofa.

Meningkatnya penyelundupan narkoba melalui jalur laut juga telah lama menjadi perhatian khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sebagai unit di bawah Kementerian Keuangan, DJBC memiliki tugas dan fungsi memberantas penyelundupan dan melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya.

“Dari data penindakan yang telah kami lakukan, sebanyak 80 persen narkoba masuk melalui jalur laut,” tegas Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, dalam wawancara khusus dengan Media Keuangan. Namun bukan berarti jalur udara dan darat aman dari para penyelundup. DJBC terus memperketat pengawasan bersama aparat keamanan lainnya. Hal ini dikarenakan para sindikat narkoba tidak memiliki modus tetap dalam melakukan kejahatan terorganisir. Perpaduan modus lama dan modus baru kerap ditemui dalam penangkapan penyelundup narkoba oleh DJBC.

Modus penyelundupan melalui laut tetap menjadi favorit para sindikat narkoba. Luasnya wilayah laut Indonesia dengan banyaknya kepulauan menjadi titik kelemahan yang dimanfaatkan. Tak heran bila para sindikat narkoba tetap bisa menemukan celah masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang minim pengawasan.

Sedangkan dalam melakukan penyelundupan melalui jalur udara, biasanya para gembong narkoba melakukan beberapa modus berikut. *False concealment* (menyembunyikan narkoba di dalam barang), *body wrapping* (melekatkan narkoba di badan), atau *inserted* (narkoba dimasukkan ke dalam bagian tubuh).

Bermain Siasat

Tak dapat dipungkiri, kecanggihan teknologi turut membuat siasat lawan semakin mumpuni. Namun DJBC tak pernah kehabisan akal untuk terus mengungguli langkah para sindikat dalam merencanakan aksi. Di jalur laut, DJBC semakin memperkuat sarana dan prasarana patroli laut, serta menambah sumber daya manusia. Gabungan patroli laut juga terus dilakukan bersama Kepolisian RI, TNI AL, Badan Keamanan Laut, serta aparat lainnya.

Di jalur udara, DJBC memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan di seluruh bandar udara di Indonesia. Petugas DJBC memiliki kemampuan menganalisa gerak-gerik penumpang yang membawa barang ilegal, di mana modus ini tak akan terdeteksi dengan *metal detector*.

Di tapal perbatasan, keunggulan DJBC dalam

menjaga keamanan tak diragukan lagi. “Tidak ada tempat di Indonesia yang bebas dari risiko masuknya narkoba,” ujar Heru. Kasus-kasus penangkapan para penyelundup narkoba di perbatasan Indonesia pun tidak sedikit. Sebut saja di perbatasan Timor Leste dengan Atambua, perbatasan Papua New Guinea dengan Skouw, perbatasan Malaysia dengan Aceh Tamiang dan Lhokseumawe, serta perbatasan Dumai dan Bengkalis.

Salah satu keunggulan DJBC dalam memberantas penyelundupan adalah keberadaan pasukan anjing K-9. Pasukan anjing K-9 DJBC tak perlu diragukan lagi kepiawaiannya di lapangan. Dengan indera penciuman yang tajam, tujuh kali lipat dari indera penciuman manusia, pasukan anjing K-9 banyak menggagalkan penyelundupan narkoba. Siasat licik gembong narkoba dapat terendus dengan bantuan anjing terlatih yang berada di bawah Unit Pendidikan dan Pelatihan Anjing Pelacak DJBC.

Upaya Nyata Pemberantasan

Sulistiandriatmoko atau akrab dipanggil Sulis menegaskan harus ada kerja sama kuat dalam menanggulangi narkoba di Indonesia. Jika seluruh aparat keamanan di Indonesia bersatu padu, belum tentu dapat memberantas habis para sindikat narkoba. Maka aparat keamanan tidak bisa bergerak sendiri. Koordinasi antar-aparat keamanan menjadi mutlak diperlukan. Terlebih para sindikat narkoba ini tidak hanya berasal dari satu negara saja. Jaringan mereka bersifat multinasional.

Sebagai gambaran, aset transaksi salah satu sindikat narkoba bisa mencapai Rp6,4

triliun. Sedangkan anggaran operasional BNN, termasuk kantor pusat dan kantor vertikal, hanya sebesar Rp1,7 triliun. Maka, BNN berulang kali merangkul masyarakat dan mengingatkan kementerian/ lembaga lainnya untuk terus bersama-sama memberantas narkoba. Tugas pencegahan dan penindakan terhadap bahaya narkoba tidak bisa serta merta diserahkan kepada BNN saja.

“Untuk menunjukkan respon kedaruratan, pemerintah sebaiknya membuat program yang terencana beserta jadwal dan rentang waktunya. Selain itu juga diperlukan sumber daya manusia, sarana prasarana, beserta anggaran khusus agar program ini berjalan optimal,” jelasnya. Saat ini, meskipun Presiden Jokowi yang telah mengumumkan status Indonesia Darurat Narkoba, namun respons kementerian/ lembaga dan masyarakat masih belum menunjukkan aksi nyata. Hal ini tentu menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh para sindikat narkoba tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi *concern* dan kehadiran Ibu (Menteri Keuangan) Sri Mulyani dalam beberapa kali pemusnahan barang bukti narkoba. Beliau juga sempat mengutarakan untuk menambah anggaran operasional pemberantasan peredaran gelap narkoba,” tambah Sulis.

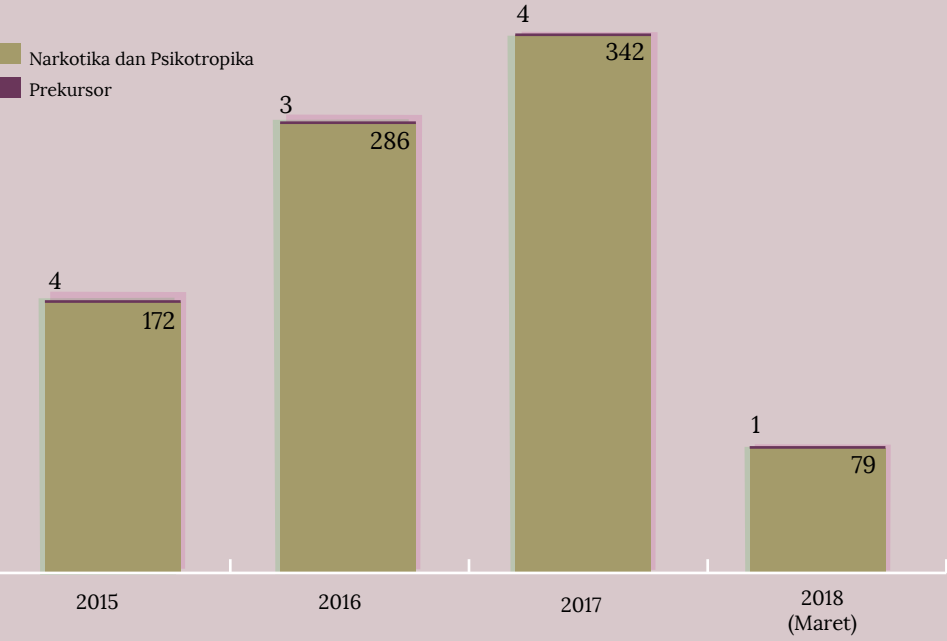
Sudah saatnya seluruh masyarakat Indonesia, baik di level pemerintahan, akademisi, pegawai, hingga pelajar membuka mata atas bahaya narkoba. Penjahatan tanpa senjata ini perlu dicegah sebelum lebih banyak lagi generasi bangsa yang menjadi korban.

Teks Pradany Hayyu

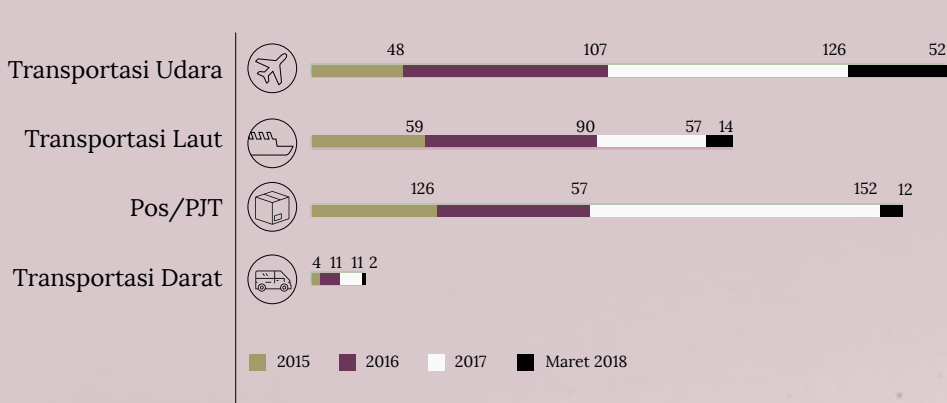
SAPU BERSIH NARKOBA

Indonesia dinyatakan darurat Narkoba. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi sejak Februari 2015 lalu. Untuk itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selalu siap menjaga wilayah Indonesia dari pengedar dan penyelundup narkoba. Sampai dengan Maret 2018, DJBC berhasil menindak 80 kasus penyelundupan narkoba. Pada akhir Februari lalu, DJBC berkoordinasi bersama tim satuan tugas Kepolisian Republik Indonesia berhasil menggagalkan penyelundupan 1,6 ton sabu.

Jumlah Kasus Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) 2015 s.d. Maret 2018



Tren Jalur Yang Ditempuh

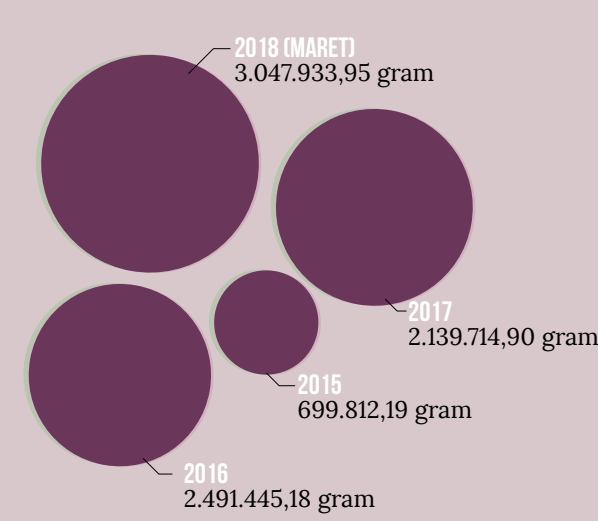


Jenis-Jenis NPP

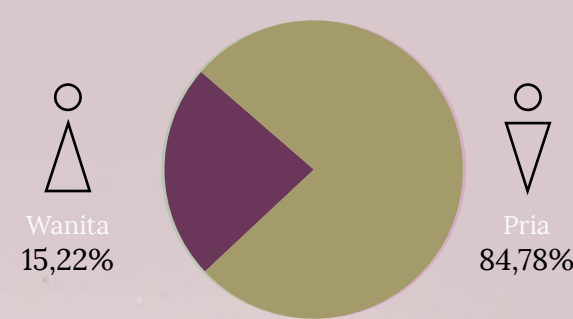
NARKOTIKA & PSIKOTROPIKA

- Ketamine
- Heroin
- Ekstasi
- Ganja
- Happy Five
- Kokain
- Morphine
- Hashish
- Amphetamin
- Methadone
- Alprazolam
- Bromazepam
- Cloromethkatinone
- Midazolam
- Diazepam
- Lorazepam
- MDVP
- MDMA
- Clonazepam
- Zolpidem Tartrade

Jumlah Berat PENYELUNDUPAN NPP



Persentase Penyelundup Berdasarkan Jenis Kelamin (2015 s.d. Maret 2018)



PREKURSOR

- Estazolam
- Triazepam
- Dimethyltryptamine
- LSD
- THC
- Kodeina
- Methylone
- NPS Synthetic
- Cannabinoid
- HCL
- Acetone
- Sulphuric Acid
- Anthranilic Acid
- Ephedrine
- Psuedoephedrine

MODUS PENYELUNDUPAN NPP 2015 s.d. Maret 2018

		2015	2016	2017	2018 (Maret)
	ABK	3	4	6	5
	Barang Bawaan	47	47	68	28
	False Concealment	20	14	22	3
	Kargo/Container	9	13	7	1
Penyembunyan di Badan		33	117	91	31
	POS/PJT	64	93	152	12
	Total	176	288	346	80

- Modus Penyelundupan NPP melalui POS/PJT semakin meningkat. Sindikat juga masih memilih pengiriman barang melalui kargo/container
- Untuk modus penyelundupan NPP melalui jalur udara maupun laut, barang banyak yang dibawa langsung oleh tersangka sebagai barang bawaan pribadi yang disembunyikan di badan maupun di tas.

Penindakan Kasus Narkoba Terbesar Terjadi di Tahun 2018

1,622 TON

Sabu di Kapal Min Lian.

8 JUTA JIWA

terselamatkan dari ancaman penggunaan NPP dengan terungkapnya kasus ini.

Setiap 1 gram sabu dikonsumsi oleh 5 orang

TAK GAMANG MENGHADANG NARKOBA



Dog handler dan anjing pelacak memeriksa muatan kapal yang dicurigai membawa narkoba

Foto
Dok. DJBC

Suasana senja itu cukup sunyi. Sekitar pukul enam sore, gawai pintar yang dimilikinya bergetar mengisyaratkan adanya penugasan khusus. Segera, tak lama kemudian, tim dari Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe B Batam serta Pangkalan Sarana Operasi (PSO) BC Tipe B Batam yang tergabung dalam Satuan Tugas (satgas) Patroli Laut BC segera berkoordinasi untuk melakukan pembagian tugas. Tim Patroli Laut ini terdiri dari para anggota pilihan yang memiliki kompetensi khusus dan telah dilatih untuk melindungi setiap jengkal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman narkoba dan penyelundupan barang-barang yang dilarang masuk ataupun keluar dari pabean.

Dalam setiap operasi jalur laut, Tim Patroli Laut BC Batam membutuhkan setidaknya delapan belas orang anggota yang terdiri dari komandan patroli, wakil komandan patroli, nakhoda, mualim, teknisi mesin, serta anggota anak buah kapal. Dalam hal ini, komandan patroli memiliki tugas untuk menentukan kebijakan di lapangan terkait dengan penegakkan peraturan kepabeanan dan cukai, sedangkan wakil komandan patroli bertugas untuk memberikan dukungan kepada komandan patroli. Di sisi lain, nakhoda sendiri juga mempunyai peran sentral untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan dan laju gerak kapal patroli. Ia didukung oleh seorang mualim yang bertugas untuk mengatur navigasi kapal, serta seorang teknisi mesin

yang bertanggung jawab untuk keamanan mesin kapal.

Tak hanya itu, semua tim Patroli Laut Bea dan Cukai Batam harus selalu siap siaga untuk setiap penugasan yang sering tak terduga sebelumnya. Tantangan yang muncul untuk mengumpulkan semua anggota dalam waktu yang singkat menjadi hal yang biasa. Menindaklanjuti penugasan sebelumnya, komandan patroli segera berkoordinasi dengan nakhoda yang secara sigap langsung menelepon satu per satu para anggotanya. Alhasil, sejam kemudian semua anggota tim Patroli Laut telah lengkap berkumpul di titik PSO BC Batam.

Unit PSO ini memiliki tugas pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi Bea dan Cukai dalam rangka menunjang tugas patroli laut dan operasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Selain itu, di KPUBC Batam sendiri, PSO bertanggung jawab untuk menjaga agar kapal patroli dan awak kapal patroli selalu

dalam kondisi prima dan siap sedia untuk melaksanakan operasi patroli. Dengan begitu, waktu persiapan operasi jalur laut pun semakin efisien dan aman.

Operasi patroli laut

Informasi awal yang dihimpun dari hasil kolaborasi antara KPUBC Batam, Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Pusat dan Polri mengindikasikan adanya potensi masuknya narkoba melalui jalur Selat Philips. Tak gamang, tim Patroli Laut BC Batam segera berangkat menuju tengah laut.

Malam itu cukup larut. Terjangan ombak sekitar satu meter tak menyurutkan laju dari kapal patroli. Hembusan angin laut utara yang cukup kencang pun tak jarang mengombang-ambingkan kapal. Namun, semua itu tak membuat patah semangat tim patroli laut dalam rangka melindungi para generasi anak bangsa.

Dalam operasi kali ini, sang nakhoda mengungkapkan bahwa kapal BC 7005 menjadi unit buru

sergap dalam operasi patroli laut. Dengan didukung tiga kapal patroli lainnya, yaitu BC 20007, BC 15026, dan BC 15027, operasi dibagi menjadi beberapa titik wilayah pemantauan. Komandan patroli pun turut menjelaskan berkat koordinasi dan kendali komando yang baik, operasi dapat berlangsung dengan lancar.

Hampir lima jam tim Patroli Laut menunggu di tengah-tengah lautan. Sekitar pukul satu lebih 45 menit dini hari, radar kapal patroli pun menunjukkan sinyal adanya sebuah kapal yang memasuki wilayah perairan. Kali ini tim Patroli Laut BC Batam segera berkoordinasi melakukan pengawasan. Tak lama kemudian, kapal patroli BC pun berhasil merapat ke kapal yang terduga target yang semula hendak melarikan diri ke perairan internasional. Dari penyisiran awal, tim Patroli Laut melihat ada beberapa kejanggalan dengan kapal tersebut. Meski bermodus operandi menjadi kapal penangkap ikan bernama Min Lian 61870, pada beberapa sisi geladak kapal dan dokumen kapal terlihat adanya ketidakkonsistenan.

Setelah beberapa jam melakukan pemeriksaan pada isi kapal, petugas patroli masih belum juga menemukan barang dimaksud. Tak berhenti di situ, atas dasar hasil wawancara dan kejanggalan data, petugas meminta nakhoda kapal Min Lian 61870 untuk menandatangani berkas penindakan namun tersangka menolak. Tak disangka saat wawancara berlangsung, mesin kapal target rusak dan anjungan terbakar. Mencium adanya upaya sabotase dan tidak kooperatif dari anak buah

kapal Min Lian 61870, petugas pun menjadi semakin yakin untuk segera membawa kapal target ke daratan.

Tantangan pun muncul kembali. Kapal target yang berukuran 1,5 kali lebih besar dari kapal patroli menjadi rintangan tersendiri. Sekitar pukul enam pagi, perintah komando memutuskan untuk menderek kapal terduga. Di tengah ombak laut dan angin utara, kapal BC 7005 dibantu kapal patroli lainnya menderek kapal terduga yang mesinnya telah mati. Setidaknya perlu perjuangan waktu tempuh hampir 2 kali dari waktu normal atau tak kurang dari lima jam perjalanan laut untuk sampai ke pangkalan BC.

Menegah 1,6 Ton Narkoba

Setibanya di dermaga Pangkalan Sarana Operasi BC Batam, tim darat yang terdiri dari unit K-9 anjing pelacak dan unit taktis sudah menanti. Tak menunggu lama, tim taktis segera melakukan *clearance* di sekitaran kapal terduga. Di sisi lain, unit K-9 yang terdiri dari *dog handler* dan anjing pelacak pun dengan lincah masuk ke selasar kapal. Tak lama berselang, Andro, salah satu anjing pelacak, mengendus aroma khas dari barang terlarang narkoba.

Sambil menggonggong, di depan Andro tampak tumpukan tali tambang yang berukuran besar yang berada di anjungan depan kapal. Tak disangka, di bawah

tumpukan tersebut tersimpan 81 karung yang berisi serbuk putih. Tim taktis pun segera melakukan uji laboratoris sebagai petunjuk awal terhadap serbuk dimaksud dengan menggunakan alat *chemical identifier*. Hasilnya, serbuk tersebut dinyatakan positif mengandung zat haram Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP).

Menurut hitungan kasar, 81 karung itu setara dengan berat lebih dari 1,6 ton. Alhasil, nilai penegahan kali ini menjadi penegahan paling besar sepanjang sejarah Bea dan Cukai dalam sekali operasi. Atas temuan ini, tim Patroli Laut BC Batam melalui Kepala KPUBC Batam menyerahkan barang bukti kapal, NPP, dan tersangka awak kapal kepada Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Titik rawan perbatasan

Potensi pemasukan barang-barang ilegal dan terlarang melalui pintu perbatasan jalur laut dan udara selalu menjadi tantangan tersendiri bagi KPUBC Batam. Susila Brata, Kepala KPUBC Tipe B Batam, menjelaskan bahwa wilayah yang berada di bawah pengawasannya memiliki area cakupan yang cukup luas serta didominasi oleh perairan. Beberapa pulau yang menjadi daerah pengawasannya meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Setokok, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau



Galang Baru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Menurutny, titik masuk rawan narkoba dan barang terlarang di wilayahnya terdapat di Pelabuhan Batam Center, Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Harbour Bay dan laut lepas yang mencakup wilayah Selat Philips yang juga menjadi batas antara Indonesia dan Singapura.

Lebih jauh, Susila menjelaskan bahwa wilayah Batam memiliki tantangan yang berbeda dengan wilayah Bea Cukai lainnnya. Hal itu disebabkan di satu sisi Batam telah ditetapkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBBP) yang merupakan hasil tindak lanjut dari ditetapkannya fungsi Pulau Batam sebagai Pulau Industri yang berstandar internasional. Namun, di sisi lain, Batam juga memiliki karakteristik daerah perbatasan, terlebih perbatasan langsung dengan Singapura yang merupakan pusat logistik dunia.

“Itu menjadi sangat potensial untuk orang kemudian menyalahgunakan fasilitas tadi, fasilitas bebas perpajakan. Di samping itu juga mungkin selain dari sisi perpajakan ada juga orang yang menyalahgunakan dari sisi perizinan-perizinan, serta menyelundupkan barang yang memang benar-benar dilarang masuk, contohnya seperti narkoba dengan jenis metamphetamin dan sabu-sabu,” jelasnya.

Modus penyelundupan narkoba

Direktur Penindakan dan Penyidikan, Bahaduri Wijayanta Bakti Mukarta, mengungkapkan bahwa secara garis besar, modus yang digunakan oleh para sindikat narkoba yang berhasil digagalkan oleh DJBC selama ini terbagi menjadi empat, yaitu barang yang dibawa oleh penumpang dengan disembunyikan di badan (*swallow/strap*) atau disembunyikan di dalam barang bawaannya

(*false compartment*), barang yang dikirimkan melalui kargo laut/udara dalam bentuk *false concealment*, barang yang dikirimkan melalui perusahaan jasa titipan (PJT) atau kantor pos dalam bentuk *false concealment*, dan barang yang dibawa oleh Anak Buah Kapal (ABK) kapal ikan ataupun nelayan.

Di sisi lain, berdasarkan data penindakan NPP oleh DJBC selama dua tahun terakhir, secara frekuensi, negara Malaysia merupakan negara asal narkoba yang paling banyak ditegah. Namun, bila dilihat secara kuantitas atau total berat barang bukti, China mendominasi sebagai negara asal barang narkoba dan disusul Taiwan.

Perpindahan jalur

Sementara itu, berdasarkan data yang dimiliki DJBC dalam tiga tahun terakhir, apabila dilihat secara frekuensi terjadi peningkatan penindakan penyelundupan NPP melalui jalur transportasi udara dan POS/PJT. Adanya penegakan hukum yang tegas bagi kejahatan narkoba, seperti hukuman eksekusi mati sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, berdampak pada adanya kecenderungan

Situasi pada saat penangkapan

Foto
Dok. DJBC

sebagian besar kurir untuk memilih jalur pengiriman melalui Pos atau PJT dan cargo atau container sebagai pilihan.

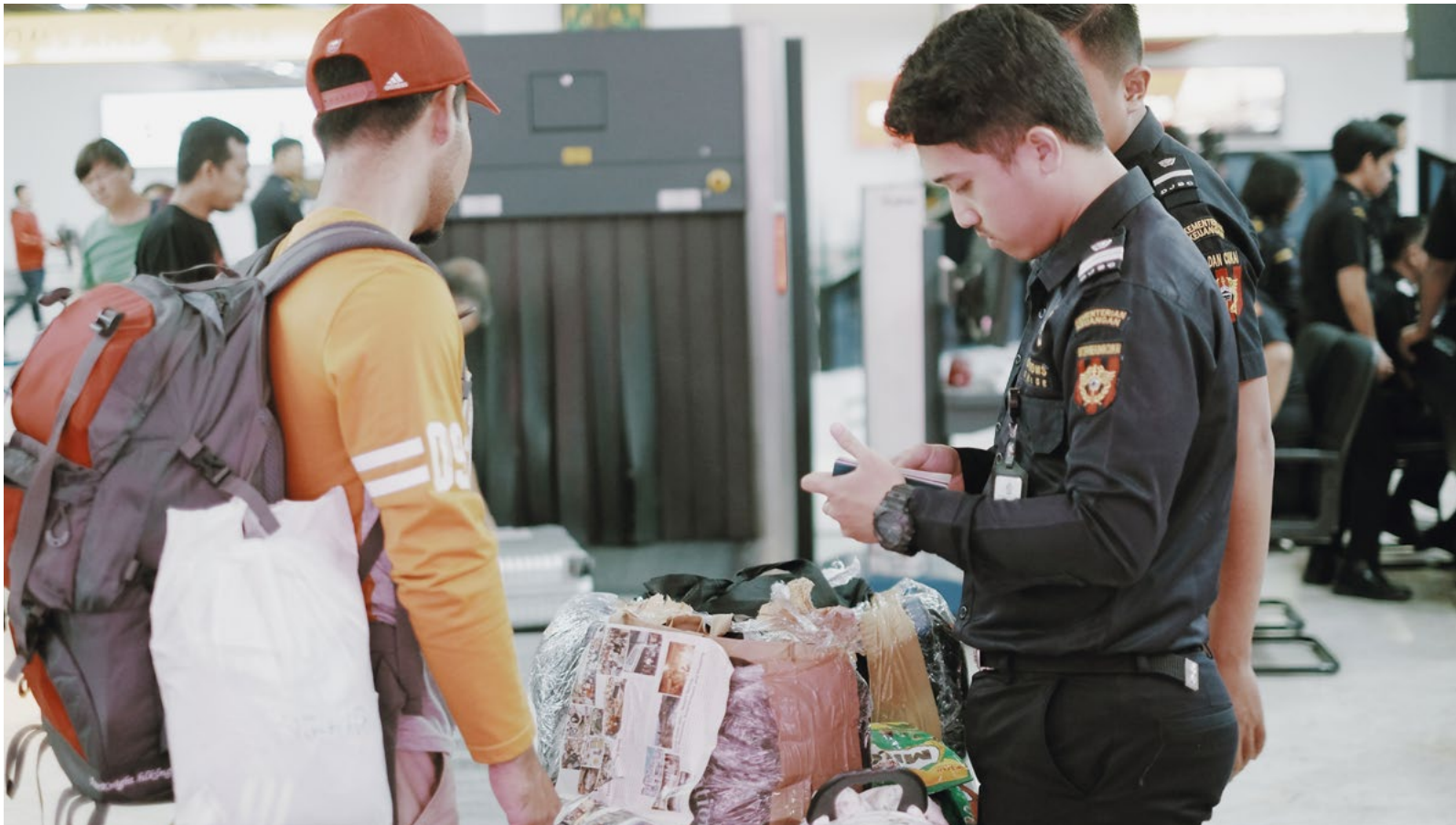
Di sisi lain, menurut Wijayanta secara kuantitas atau total berat tegahan, penyelundupan dengan modus jalur laut juga mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2017 jumlah kasus narkoba melalui jalur laut sebanyak 57 kasus dengan berat narkoba yang berhasil ditegah sebesar 861,38 kilogram. Data DJBC menunjukkan bahwa jenis mathamphetamine (sabu) menjadi jenis yang paling banyak ditegah sebesar 588,46 kg atau sekitar kurang lebih 62 persen dari total berat tangkapan dari jalur laut.

“Di tahun 2018, sampai dengan saat ini saja jumlah tangkapan melalui jalur laut terjadi sebanyak 11 kasus dengan jumlah berat barang bukti yang berhasil ditegah meningkat yaitu sebanyak 2.780 kilogram. Dari data tersebut dapat kita lihat jumlah berat barang bukti yang berhasil ditegah saat ini mengalami kenaikan 2 kali lipat dari tahun lalu atau kenaikan sekitar 200 persen,” jelasnya.

Teks Abdul Aziz

Laporan Utama

PENGUATAN ORGANISASI DAN UPAYA PENEGAHAN



Fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah menjaga perbatasan dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Pencegahan penyelundupan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari barang berbahaya serta untuk menjaga iklim usaha yang sehat. Sebab itu, penguatan DJBC menjadi krusial.

Petugas Bea Cukai memeriksa barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Foto
Resha Aditya Pratama

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, Robert Leonard Marbun mengatakan Indonesia memiliki wilayah pengawasan yang luas. Ada banyak jalur dan pintu penyelundupan. Penindakan dan pencegahan yang dilakukan di satu titik tidak bertahan lama karena pelaku akan mencari alternatif lain.

Dijelaskan Robert lebih lanjut, tidak ada barang khusus yang menjadi prioritas penegahan. Proses penegahan adalah berdasarkan tren dan analisis dampak negatif barang ilegal terhadap kesehatan, keamanan, dan perekonomian nasional.

Saat ini, selain narkoba, prioritas pengawasan adalah komoditi strategis seperti beras, garam, dan gula karena waktu sudah menjelang lebaran. “Banyak spekulasi mencoba melakukan penyelundupan dengan harapan mendapat untung berlipat di tengah meningkatnya permintaan akan komoditi tersebut,” ujar Robert.

Sementara untuk bawaan penumpang, barang bernilai tinggi seperti tas premium atau berlian masih menjadi atensi. Komoditi tersebut biasanya dibawa dengan modus jasa titip. Penyelundupan dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak-pajak resmi.

Dari total penindakan yang dilakukan DJBC, sekitar 50 diantaranya adalah impor umum. Sementara penindakan dengan modus barang penumpang tercatat sebanyak sekitar 5 persen.

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Bea Cukai, Nugroho Wahyu mengungkapkan pada tahun 2016 ada hampir 15 ribu kasus penindakan nasional. Angka ini kemudian naik signifikan di tahun 2017 menjadi lebih dari 24 ribu kasus. Artinya, DJBC perlu memperkuat diri agar mampu mengantisipasi meningkatnya penyelundupan.

Penguatan Kepabeanan

Nugroho menceritakan, penguatan kepabeanan dan cukai saat ini berjalan sesuai target dan linimasa yang telah ditetapkan. Ada 4 tema besar yang di usung, yakni Penguatan Integritas, Budaya Organisasi dan Kelembagaan, Optimalisasi Penerimaan,

Penguatan Fasilitas, serta Efisiensi Pelayanan dan Efektivitas Pengawasan.

Keempat tema tersebut diwujudkan dalam 19 inisiatif strategis. Salah satu inisiatif terkait dengan tugas penegahan barang ilegal adalah Pengembangan Sistem Pengawasan Kepabeanan dan Cukai. Sistem ini terdiri dari pengembangan sistem aplikasi pengawasan dan administrasi patroli laut, otomatisasi manajemen pengawasan, pembentukan Customs Narcotic Targeting System (CNTS), integrasi sistem aplikasi pengawasan, dan pembentukan *special enforcement team*.

Menurut Nugroho, penggunaan aplikasi pelayanan berbasis teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan, termasuk dalam pengawasan di internal organisasi. Informasi dari para pemangku kepentingan sudah dapat diterima melalui portal layanan pengaduan di www.beacukai.go.id. Tahun 2017 saja ada 755 pengaduan. Tindak lanjutnya adalah pengumpulan data dan informasi, investigasi internal, dan perbaikan proses bisnis. “Tujuan yang ingin dicapai dari layanan pengaduan ini adalah transparansi kinerja pegawai,” ungkap Nugroho.

Strategi penegahan

DJBC menerapkan manajemen risiko dan *human intelligence* dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat. Mengingat banyaknya titik rawan berdasarkan komoditi dan kewilayahan, kini kepabeanan

menerapkan sistem pengawasan terpadu, baik patroli laut yang terjadwal maupun penargetan berdasarkan hasil analisis.

Menurut Robert, tidak ada negara yang kondisi kepabeannya serupa dengan Indonesia. Negara-negara dengan wilayah luas umumnya bukan negara kepulauan, sedangkan negara-negara kepulauan umumnya memiliki wilayah yang tidak luas. Sebab itu, DJBC mempelajari beberapa teknik pengawasan yang digunakan negara-negara lain dan menerapkannya sesuai kondisi di Indonesia.

Sebagai contoh pada pengawasan impor umum DJBC sudah mengimplementasikan Indonesia National Single Window (INSW) sebagai sistem satu pintu yang mempermudah proses pengawasan. Sistem ini diadopsi dari negara-negara maju untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan menekan biaya yang timbul dari ekspor maupun impor.

Contoh lain adalah penggunaan data *Advance Passenger Information* dan *Passenger Name Record* untuk mengawasi penyelundupan dengan modus barang bawaan penumpang. Sistem ini sebelumnya digunakan oleh negara-negara Amerika Serikat, Uni Eropa dan Australia untuk manajemen risiko penumpang pesawat terbang internasional.

Teks Irma Kesuma



Direktur Jenderal Bea Cukai

Foto
Anas Nur Huda

BEA CUKAI SIGAP HADANG NARKOBA

K eberhasilan pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia tak lepas dari peran besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Permasalahan narkoba telah menjadi momok masyarakat Indonesia sejak lama. Ironinya, kegesitan petugas memberantas sindikat narkoba tak juga menyurutkan jumlah permintaan narkoba di Indonesia yang semakin besar. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kinerja DJBC dalam memberantas narkoba, simak wawancara Media Keuangan dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, berikut ini.

Bagaimana tanggapan Anda atas keberhasilan DJBC dalam penegahan narkoba bulan Februari lalu sebesar 1,6 ton?

Kami bersyukur, capaian tersebut merupakan kerja sama yang menunjukkan wujud nyata DJBC bersinergi dengan instansi lainnya. Sinergi ini sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi untuk menghilangkan ego sektoral, tegas, dan berani dalam memberantas narkoba.

Apakah capaian ini menjadi prestasi besar DJBC dalam konteks penegahan narkoba selama ini?

Ya, selama ini DJBC pada tahun 2016 berhasil melakukan penegahan narkoba seberat 2,5 ton dengan jumlah 288 kasus. Pada tahun 2017, DJBC berhasil melakukan penegahan narkoba sebesar 2,1 ton dengan jumlah 346 ton. Sedangkan pada tahun 2018 sudah terungkap 80 kasus narkoba dengan penegahan sebesar 3,04 ton.

Dengan banyaknya kasus penangkapan penjahat narkoba melalui jalur laut, benarkah terjadi pengalihan dari pintu masuk jalur udara ke jalur laut?

Dari pintu masuk ke wilayah Indonesia melalui darat, laut, dan udara, jalur masuk narkoba lebih banyak dilakukan melalui jalur udara dan laut. Modus-modus yang dilakukan para penyelundup untuk memasukkan narkoba lewat jalur udara di antaranya dengan *False concealment* (menyembunyikan narkoba di dalam barang), *body wrapping* (melekatkan narkoba di badan), atau *inserted* (narkoba dimasukkan ke dalam bagian tubuh).

Jalur laut menjadi jalur yang paling banyak diminati oleh para sindikat narkoba karena kondisi perairan Indonesia masih memiliki banyak kelemahan. Luasnya wilayah laut Indonesia dan banyaknya kepulauan benar-benar dimanfaatkan oleh para penyelundup narkoba. Selain itu, kapal laut yang mampu mengangkut berbagai macam barang dengan jumlah besar, termasuk narkoba, juga menjadikan modus penyelundupan melalui laut ini sebagai favorit.

Penyelundupan narkoba ini merupakan kegiatan lintas negara. Apakah ada koordinasi dengan instansi di luar negeri?

Benar, narkoba ini merupakan kejahatan lintas negara. Para pelaku tidak lagi memandang batas negara, sifatnya sudah multinasional. Kita selalu berkomunikasi dengan Bea dan Cukai negara tetangga, seperti Kastam Diraja Malaysia, China Customs, Hong Kong Customs and Excise Department, Australia Border Force, dan sebagainya.

Di samping itu, kita juga tergabung dalam Regional Intelligence Liaison Office (RILO) yang merupakan organisasi jaringan intelijen yang terdiri dari administrasi pabean di seluruh dunia. Begitu juga dengan keikutsertaan DJBC dalam Customs Enforcement Network (CEN).

Apa tantangan dalam menegah narkoba serta barang-barang ilegal lainnya?

Pertama, luasnya wilayah Indonesia yang memiliki banyak pintu masuk dan wilayah perbatasan yang rentan penyelundupan. Kedua, Indonesia menjadi pasar paling potensial dalam mengembangkan bisnis perdagangan gelap, baik narkoba dan barang ilegal lain yang bernilai ekonomi. Meskipun harganya melambung tinggi, permintaan narkoba di Indonesia sangatlah besar. Di Tiongkok, 1 gr sabu seharga Rp30 ribu, tiba di Malaysia menjadi Rp300 ribu, kemudian masuk pasaran Indonesia menjadi sekitar Rp1-1.5 juta.

Ketiga, setiap melakukan pengawasan dan penangkapan penyelundup, keselamatan jajaran DJBC menjadi taruhannya. Untuk itu, para petugas DJBC di lapangan selalu dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang mumpuni dalam mendeteksi gerak-gerik penyelundup, baik di bandara, di pos perbatasan, di pelabuhan, maupun saat melakukan penangkapan di laut. Mereka rutin berlatih karate untuk menjaga fisik agar tetap prima.

Dengan fasilitas dan kapasitas yang ada, apakah DJBC sudah merasa cukup dalam mendukung upaya menegah narkoba dan barang-barang ilegal?

DJBC belum merasa cukup dalam mendukung upaya

pencegahan narkoba dan barang ilegal. Fasilitas yang dimiliki perlu di-*upgrade* dan perlu adanya penambahan jumlah fasilitas pendukung, seperti mesin *x-ray* untuk kapal penumpang dan kargo, mesin deteksi narkoba, dan sebagainya.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia setiap pegawai berbeda dalam hal kemampuan serta pengetahuannya terkait narkoba. Sehingga upaya peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia perlu ditingkatkan, baik melalui program pelatihan di Pusdiklat Bea dan Cukai maupun pendidikan dan pelatihan di luar institusi, baik di dalam maupun luar negeri.

Apa upaya DJBC untuk memperkuat upaya penegahan narkoba dan barang ilegal?

Beberapa upaya yaitu dengan pengembangan unit Anjing Pelacak DJBC (K-9) berupa pengembangan *Dog Marine Customs* di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam. Kedua, pengembangan sistem analisa dan *targeting* penumpang maupun *container*/kargo dalam sistem aplikasi yang digunakan DJBC dalam melakukan analisa dan *targeting*. Ketiga, pembentukan Pusat Komando dan Pengendalian (PUSKODAL). Keempat, utilisasi dan peremajaan sarana dan prasarana kapal patrol, alat pemindai narkoba, alat deteksi narkoba, dan sebagainya. Kelima, sinergi dengan instansi penegak hukum dalam rangka Kebijakan Strategi Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

Teks Pradany Hayyu

Sekarang Waktunya Nabung Saham

Merencanakan keuangan untuk masa depan sudah menjadi keharusan. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menabung saham.

Selain lebih aman dari inflasi, saham juga menguntungkan dalam jangka panjang. Ditemui di kantornya, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hosea Nicky Hogan mengajak Media Keuangan untuk memanfaatkan pasar modal Indonesia terus tumbuh selama sepuluh tahun terakhir.

Hosea Nicky Hogan, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI)

Foto Anas Nur Huda



Seperti apa minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di saham saat ini?

Jika dibandingkan dengan industri keuangan lain seperti perbankan, asuransi, atau lembaga pembiayaan, literasi dan inklusi pasar modal Indonesia adalah yang paling rendah. Hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 menunjukkan tingkat literasi pasar modal sebesar 4,4 persen sedangkan inklusinya 1,25 persen.

Saat ini jumlah investor saham kita mendekati 640 ribu, sedangkan investor reksadana sekitar 550 ribu. Jadi total investor pasar modal ada sekitar 1,1 juta. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain angka ini masih sangat kecil. Baik di Malaysia, Thailand, maupun SIngapura jumlah investor pasar modal sudah ada yang mencapai belasan persen. Hal inilah yang mendasari bursa untuk melakukan kampanye “Yuk Nabung Saham” sejak tahun 2015.

Apa pengaruh rendahnya investasi tersebut terhadap perekonomian?

Jadi begini. Tahun 2015 sekitar 63 persen saham di bursa dimiliki oleh investor asing. Angka tersebut mewakili sekitar Rp1.700 triliun. Namun di Malaysia dan di Thailand, angka Rp1.700 triliun tersebut hanya mewakili 25 persen investor asing. Jadi yang 75 persen adalah investor lokal. Akhirnya, dulu sering kita dengar pergerakan transaksi bursa sangat ditentukan oleh investor asing. Investor asing beli, kita ikut beli. Investor asing jual, kita ikut jual. Investor asing beli indeks naik, investor asing jual indeks turun.

Program amnesti pajak banyak mengubah komposisi itu. Saat ini jumlah investor asing dan lokal sudah hampir 50:50. Tahun 2017 tahun lalu indeks kita naik 19,99 persen di tengah penjualan asing sebesar 40 triliun, fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik. Pengaruhnya ke perekonomian adalah dengan indeks yang stabil tentu akan

meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Siapa target utama kampanye “Yuk Nabung Saham”?

Pada 20 tahun yang lalu, untuk membuka rekening saham butuh investasi awal Rp25-50 juta. Jadi tidak salah bila persepsi saat itu untuk menjadi investor harus orang kaya. Selain itu, saat ingin membeli atau menjual saham, mereka harus telepon dulu ke pialang saham. Sahamnya dalam bentuk warkat. Akhirnya perusahaan sekuritas dan anggota bursa melakukan efisiensi melalui *online trading* dan *mobile trading*. Karena sudah berbasis aplikasi, investor bisa bertransaksi sendiri tanpa harus menelepon dan bentuknya *scriptless*.

Selain itu, sekarang hanya dengan Rp100 ribu masyarakat sudah bisa membuka rekening saham. Kalau kita bicara Rp100 ribu saya kira semua lapisan masyarakat bisa jadi investor. Kemudian, dua tahun terakhir kita membuka Galeri Investasi di kampus-kampus. Targetnya adalah mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Mahasiswa-mahasiswa tersebut banyak yang kemudian berinisiatif untuk melakukan edukasi ke daerah asal mereka.

Miskonsepsi seperti apa yang masih kerap ditemui?

Ada tiga miskonsepsi yang sudah kita sadari sejak awal kampanye. Pertama, saham itu identik dengan mahal dan butuh modal besar. Kedua, persepsi bahwa saham itu spekulasi. Orang bisa saja berspekulasi dengan pergerakan harga. Tetapi pesan yang kami sampaikan selalu dalam konteks investasi, bukan *trading*. Kalau kita bicara jangka panjang, bursa kita adalah bursa dengan kenaikan indeks tertinggi di dunia dalam 10 tahun terakhir.

Ketiga, saham itu sering dipandang sulit, *ruwet*, harus berhitung. Padahal saham itu seharusnya sederhana. Kalau setiap saat harus baca laporan keuangan, kasihan sekali para petani kecil atau

pedagang cendol, seolah-olah mereka *gak* punya kesempatan menjadi investor. Contoh sederhana, hampir semua bank besar sudah *go public*. Itu kan perusahaan-perusahaan yang sudah ada sejak 30 yang tahun dan rasanya 20-30 tahun ke depan tetap masih akan ada. Jadi tidak perlu dibuat rumit atau harus hitung-hitungan.

Jika masyarakat sudah tertarik membeli saham, harus mulai dari mana?

Bursa efek punya 29 kantor perwakilan di seluruh Indonesia dan dalam setahun kedepan akan menjadi 34 sesuai jumlah provinsi kita. Galeri investasi di kampus-kampus juga melayani pembukaan rekening. Di Jakarta, masyarakat bisa datang ke BEI. Kami mempunyai program rutin bernama Sekolah Pasar Modal (SPM). Peserta SPM bisa membuka rekening saham di sini cukup dengan Rp100.000 untuk setoran awal. Kalau akunnya sudah jadi, peserta sudah bisa langsung beli saham. Kalau sekedar tahu, rasanya terlalu sayang. Pasar modal punya potensi yang sedemikian besar untuk masyarakat.

Adakah proteksi bagi investor?

Investasi apapun pasti ada resiko, jadi tidak ada proteksi. Artinya kalau kita beli saham, kemudian harganya turun, itu resiko investasi. Meski begitu, kita selalu mengingatkan untuk membeli saham dalam konteks jangka panjang, bukan spekulan.

Tetapi untuk perlindungan, jika perusahaan sekuritas bermain curang, ada lembaga di bawah perusahaan bursa bernama Securities Investor Protection Fund (SIPF) yang melindungi keamanan aset investor. Fungsinya mirip seperti Lembaga Penjamin Simpanan di industri perbankan. Jaminan untuk SIPF mencapai Rp100 juta per rekening.

Apa yang pasar modal tawarkan untuk kelas menengah muslim yang terus tumbuh?

Dari total 558 saham yang berada di bursa, lebih 60 persennya adalah saham



Suasana Bursa Efek Indonesia.

Foto Anas Nur Huda

syariah. Ada daftar saham syariah yang dikeluarkan oleh OJK bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Setiap 6 bulan mereka merilis daftar efek yang sesuai prinsip syariah yang bisa masyarakat pilih.

Saat ini ada 12 anggota bursa yang memiliki sistem *online trading* syariah. Jadi sahamnya syariah, sistem *online tradingnya* syariah, dana hasil penjualan juga disimpan pada bank yang memiliki unit syariah. *Online trading* syariah ini hanya ada di Indonesia. Itu sebabnya kita mendapat penghargaan dua tahun berturut-turut sebagai bursa yang mendukung saham-saham syariah.

Bagaimana menjangkau wilayah Indonesia yang sedemikian luas?

Kita memang belum sampai ke pulau-pulau kecil. Tetapi Galeri Investasi juga ada di kampus-kampus di daerah. Mereka berperan banyak. Selain itu, saat ini ada total 368 unit komunitas investor yang tersebar di berbagai daerah. Kita sempat mengumpulkan mereka untuk kegiatan pasar modal. Komunitas ini menjadi kepanjangan tangan bursa untuk kampanye Yuk Nabung Saham.

Di Aceh ada salah satu daerah bernama Takengon. Butuh waktu 8 jam perjalanan darat dari Banda Aceh ke sana, masyarakat di sana sudah ada yang menjadi investor. Ada satu warung kopi yang pemiliknya investor saham. Di warungnya terdapat papan putih yang isinya seputar harga saham, jadwal pembayaran deviden dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Luar biasa *kan?*

Apa harapan bapak agar “Yuk Nabung Saham” benar-benar inklusif?

Kampanye ini masih baru, jadi saya cukup optimis. Kita memulai kampanye ini di tengah masyarakat yang salah persepsi. Dalam 10 tahun terakhir, IHSG kita naik 200 persen dan kita tidak menikmatinya. *Kan* sayang banget. Sedangkan di sisi lain Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-5 di dunia tahun 2030. Manfaatkan momentum ini. Jangan sampai saat nanti ekonomi kita sudah sedemikian besar kita tidak mendapatkan apapun untuk menambah kesejahteraan.

Saya berharap masyarakat tidak lagi lari begitu mendengar kata investasi atau saham. Saatnya sekarang kita mencari tahu lebih jauh mengenai saham dengan mendatangi Galeri Investasi, kantor perwakilan BEI, atau hadir di acara-acara mengenai saham. Persepsi yang salah justru menghilangkan kesempatan masyarakat untuk bisa mendapat manfaatnya.

Teks Irma Kesuma

Laboratorium Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (LPIK)

Itjen Modern Berbasis Teknologi Informasi

Di era digital saat ini, pesatnya teknologi informasi telah merambah dunia birokrasi. Penggunaan teknologi terbukti mampu membuat kinerja di lingkungan birokrasi menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Begitu juga dengan Kementerian Keuangan yang berupaya memenuhi tuntutan zaman melalui transformasi digital.

Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai unit pengawas intern Kementerian Keuangan juga melakukan terobosan demi menuju “Itjen Modern Berbasis Teknologi Informasi.” Sesuai dengan arahan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati, Itjen harus lebih mengimplementasikan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan sebuah ruangan khusus untuk mengolah data-data audit dan secara regular mendidik para auditor untuk melakukan TABK.

Sekretariat Itjen pun tak berlama-lama untuk mewujudkan inovasi tersebut. Setelah arahan Inspektur Jenderal pada rapat pimpinan bulan April 2017, Sekretariat Itjen segera berkoordinasi terkait anggaran. Mengingat permintaan pembangunan laboratorium tersebut tepat di tengah tahun anggaran, bukan berarti hal tersebut menjadi rintangan. Koordinasi dan pembagian tugas pun dilakukan mulai dari pembuatan Rincian Anggaran Biaya, *Term of Reference*, hingga inventarisasi kebutuhan laboratorium audit.

Saat ditemui di Laboratorium Pengawasan Inspektorat Jenderal (LPIK), Kepala Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan, Ahmad Ghuftron, dan Kepala Subbagian Kerumahtanggaan dan Protokoler, Wiyoso Tranggono, menjelaskan seluk beluk laboratorium audit tersebut. “Itjen beradaptasi dengan pesatnya teknologi. Lab audit ini sebagai sarana untuk mengembangkan sistem pengawasan yang kontinu, *real time*, dan sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi,” jelas Ghuftron.

Mengingat pentingnya fungsi laboratorium audit ini, tak pelak Sekretariat Itjen berusaha merampungkan proses pembangunannya hingga berupaya melakukan revisi anggaran. Pada September 2017, pembangunan pun mulai dikerjakan. Pada Rapat Kerja Pimpinan Itjen pada 27 November 2017, Inspektur Jenderal meresmikan laboratorium yang berlokasi ke Kantor Itjen Gedung Djuanda II lantai 13 ini. Dalam acara peresmian ini, turut dilaksanakan pula *video conference* dengan Eselon I terkait penyampaian hasil pengawasan dan rencana pengawasan.

Ruang Multifungsi

Ruang laboratorium itu tidak terlalu luas. Namun dengan desain dan penataan ruang yang apik, laboratorium ini memiliki banyak fungsi utama. “Lab audit ini bisa disebut ‘6 in 1’, ada enam fungsi dalam satu ruang,” kata Ghuftron.

Pertama, laboratorium audit berfungsi untuk praktik pengawasan intern yang modern sesuai *reason best*

practices, yaitu melalui *continuous audit*. Nantinya lab ini akan diharapkan menjadi pusat analisis *big data* pengelolaan keuangan negara untuk pelaksanaan *continuous audit*. Kedua, fungsi penyempurnaan proses bisnis Itjen Kementerian Keuangan, termasuk pelayanan kepada *stakeholders*.

Ketiga, laboratorium audit sebagai media untuk *Focus Group Discussion* (FGD) dan membangun *community of practices* (sekumpulan orang yang berdiskusi dalam satu bidang yang sama). Saat ini, laboratorium audit telah digunakan untuk berkumpul para pegawai muda Itjen untuk saling berbagi dalam penerapan TABK di unit-unit Eselon I Kementerian Keuangan. Keempat, fungsi koordinasi melalui *video conference*. Laboratorium audit dapat dijadikan sebagai sarana berkomunikasi melalui *video conference* secara intensif dengan pimpinan Eselon I, klien pengawasan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan pihak lainnya.

Kelima, laboratorium audit sebagai sarana studi banding. Perlu diketahui, kapabilitas unit internal audit di Indonesia mengadopsi pengukuran internasional dengan bantuan *tools* bernama Internal Audit Capability Model (IACM). Pengukuran tersebut nanti akan menghasilkan lima level. Sebagian besar unit internal audit di Indonesia masih di level 1 dan sudah ada beberapa yang di level 2 dan 3. Kemudian berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Teknologi *touch screen* pada dinding memudahkan pengguna melakukan presentasi

Video conference dengan Eselon I terkait penyampaian hasil pengawasan dan rencana pengawasan.

Foto Dok. Inspektorat Jenderal



Nasional 2015–2019, Presiden Jokowi menginstruksikan agar seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) telah berada di level 3 pada akhir tahun 2019.

Kementerian Keuangan yang saat ini telah berada di level 3 menuju level 4 telah menjadi *benchmark* beberapa kementerian/ lembaga. Diproyeksikan pada tahun 2018 hingga 2019 akan semakin banyak kunjungan studi banding dari kementerian/ lembaga lainnya serta pemerintah daerah. “Salah satu kegiatan yang tiada henti di Itjen itu ya melayani kunjungan *benchmarking*. Kami sering kesulitan mencari ruangan untuk menerima kunjungan,” tambah Ghuftron. Dengan adanya laboratorium audit ini, peserta kunjungan juga akan dikenalkan model internal audit modern.

Keenam, laboratorium audit ini juga berfungsi sebagai perpustakaan digital dan perpustakaan nondigital. Sebagian buku-buku Perpustakaan Itjen tersusun rapi bersebelahan dengan proyektor. Laboratorium ini memang tepat digunakan untuk sarana pembelajaran para auditor muda. Ke depan, semua *e-book* di Perpustakaan Itjen bisa diakses untuk pengembangan kapasitas internal audit melalui *knowledge sharing* para pegawai.

Sentuhan teknologi terkini

Wiyoso Tranggono atau lebih akrab disapa Ocit menjelaskan keunggulan laboratorium audit Itjen yang menggunakan teknologi termutakhir. Dengan fitur *Interactive Projectors*, pengguna bisa menampilkan slide dan menulis secara digital pada dinding ruangan yang polos. Tampilan yang interaktif ini memudahkan pengguna melakukan presentasi dengan teknologi *touch screen* pada dinding. Dinding ruangan yang polos pun berfungsi layaknya layar komputer.

Ke depan, laboratorium audit ini diharapkan dapat digunakan dengan semaksimal mungkin oleh *community*

of practices. Nantinya akan disusun jadwal penggunaan dengan tema-tema terkait pengawasan internal yang semakin beragam. TABK juga diharapkan semakin bisa diterapkan dengan banyaknya kegiatan berbasis komputer yang dilaksanakan di laboratorium multifungsi ini. Kini Itjen siap bertransformasi menjadi unit pengawasan internal yang modern dan berbasis teknologi.

Tiap-tiap unit Eselon I telah menyadari adanya perubahan dari sistem konvensional ke digital. Maka, pemanfaatan teknologi pun telah dilakukan dalam beberapa layanan dan proses bisnis Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki aplikasi tumpuan bernama CEISA yang merupakan sistem Integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Begitu juga dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Direktorat Jenderal Pajak pun tak kalah dengan melahirkan inovasi SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak). Begitu juga disusul dengan unit Eselon I lainnya.

Teks Pradany Hayyu

Wanita Tangguh Berhati Teguh

Semburat fajar mengintip dari balik jendela rumahnya. Meski masih dini, asap dapur sudah mulai mengepul di bilik belakang rumahnya. Setelah selesai memasak untuk keluarga, ia harus mempersiapkan kebutuhan dari ibu kandungnya yang memasuki usia senja. Pasca itu, ia pun harus segera bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Karena jarak rumah ke kantor cukup jauh, ia pun harus berangkat lebih pagi.

Sesampai di kantor, ia harus mengemban tugas yang tak mudah. Ia harus mengikuti jam kerja kantor yang dimulai dari pukul setengah delapan pagi hingga lima sore. Tak jarang ia harus pulang lebih larut karena beban pekerjaan yang cukup banyak. Sebagai wanita, ia tak hanya mampu mengemban tugas sebagai sosok istri, ibu, anak, namun juga sebagai pelayan aparatur sipil negara (ASN). Ialah Hana Sri Juni Kartika yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), salah satu unit di bawah Sekretariat Jenderal yang memberikan pelayanan di bidang administrasi pengadilan pajak.

Foto
Anas Nur Huda



Hana Sri Juni menyambut pegawai baru.

Foto bersama keluarga.

Foto Dok.Pribadi



Selain sibuk dengan rutinitas, ia juga menyempatkan diri untuk berbagi pengetahuan kepada para calon punggawa keuangan negara di kampus Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN). Ia ingin agar pengalamannya selama 28 tahun mengabdikan di Kemenkeu dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Harapannya, cerita tersebut dapat menginspirasi mereka agar mau berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya.

“Tiap minggu saya ambil waktu setengah hari untuk saya mengajar di STAN. Di sana saya bisa banyak cerita, tidak hanya ilmu hukum yang kering dan mati, tetapi ilmu hukum yang hidup. Bagaimana hukum itu mempunyai pengaruh dan dilaksanakan di dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kita bekerja. Dan juga di sana saya bisa memberikan motivasi, nilai-nilai Kemenkeu, nilai-nilai kehidupan sebagai manusia, sebagai insan ciptaan Tuhan. Bagaimana kita hidup sebagai aparatur sipil negara yang harus mempunyai integritas yang tinggi, khususnya di lingkungan Kemenkeu. Itu saya tularkan kepada adik-adik kita yang nantinya itu akan menjadi penerus saya, penerus kita bersama,” jelasnya.

Seperempat abad di bidang hukum

Sejak memulai karirnya di Kementerian Keuangan pada tahun 1990, Hana merasa semua hal yang dikerjakan memberikan nilai tambah bagi dirinya. Hal itu juga menjadikannya semakin terinspirasi untuk terus bekerja dan belajar lebih baik lagi. Pertama kali ditempatkan di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Jenderal Kemenkeu, ia dihadapkan pada berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan bidang hukum. Pasang surut reformasi di instansinya pun turut ia rasakan.

Setelah kurang lebih empat belas tahun bekerja di Biro Hukum dan Humas, ia ikut merasakan reorganisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Pada tahun 2004, Biro Humas berpisah dari Biro Hukum dan Humas sebagai unit tersendiri. Selain itu, karena tuntutan pekerjaan yang besar, Biro Hukum sendiri pun dipisah menjadi Biro Hukum dan Biro Bantuan Hukum pada tahun 2006. Untuk mendukung pola kerja yang semakin dinamis di unitnya, ia pun diangkat menjadi Kepala Bagian Bantuan Hukum I Biro Hukum pada tahun 2004, sebelum dipindahkan menjadi Kepala Bagian Bantuan Hukum III Biro Bantuan Hukum pada tahun 2008. Menjadi maestro bidang hukum di Kemenkeu, Hana pun berhasil dipromosikan menjadi Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan di tahun 2015.

Selama kurang lebih 25 tahun berkecimpung di bidang hukum, ia tidak pernah merasa bosan. Justru ia merasa senang dan menikmati karena dengan pekerjaannya tersebut, ia dapat menjumpai lebih banyak ilmu-ilmu baru yang diperoleh dari setiap kasus yang ia tangani. Dengan begitu, ia merasa semakin diperkaya dengan berbagai lingkup ilmu hukum yang terkait dengan cakupan tugas dan fungsi seluruh unit Eselon I Kemenkeu.

“Bayangkan saja kalau seluruh unit eselon I di Kemenkeu, setiap masalah hukumnya selalu diberikan ke Bantuan Hukum dan di situ merupakan tantangan bagi saya. Kalau ada aturan-aturan yang baru yang terkait dengan perbendaharaan, pengelolaan utang, anggaran, kepabeanan, cukai, mengenai perpajakan atau mengenai hal-hal yang lain, termasuk kekayaan negara, ya kita harus selalu menguasai,” jelasnya.

Terakhir, ia pun diberikan amanah untuk memimpin unit Sekretariat Pengadilan Pajak (Set PP) melalui pelantikan di akhir Desember 2016. Di sini, ia berkomitmen untuk membawa semua ilmu dan pengalamannya di bidang hukum perpajakan dan kepabeanan cukai yang ia peroleh dari pengalaman sebelumnya. Baginya, Set PP memerlukan sentuhan orang hukum, terutama dalam banyak kasus yang terkait dengan hukum acara di peradilan. Harapannya, dengan hadirnya dirinya, ia akan dapat meningkatkan kinerja dan integritas dari Set PP.

Inspirasi orang tua

Menjadi anak kesayangan dari ayahnya, Yusuf Sri Sudono, tidak membuat Hana kecil menjadi bermalas-malasan. Sebaliknya, ia malah merasa terdorong untuk semakin berbakti kepada orang tua dan mewujudkan harapan dari keduanya, yakni mengenyam jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Sedari awal, ayahnya sudah berkomitmen lebih baik tidak memiliki harta sepeserpun asalkan semua anak-anaknya menggapai cita-cita setinggi-tingginya.

Baginya, ayah menjadi seorang figur inspirasi. Meski menjadi purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, ayahnya tidak pernah memarahi dirinya dan saudaranya secara meledak-ledak. Yang ia kagumi, ayahnya justru banyak terdiam ketika ia

atau saudaranya berbuat salah. Hal itu lah yang membuat dirinya selalu merasakan kehangatan dan kedekatan dengan sosok ayah. Sayangnya, ayahnya tak sempat melihat dirinya diwisuda sebagai Sarjana Hukum di Universitas Diponegoro.

Tak pantang menyerah, ia pun berjanji untuk merealisasikan keinginan ayahnya. Ia pun berhasil lulus dan tak lama berselang langsung diterima sebagai ASN di Kemenkeu. Di sisi lain, ibunya, Maria Sutinah, menjadi sosok pahlawan bagi Hana. Meski tidak mengenyam pendidikan tinggi, ibunya selalu siap membantunya dalam kondisi apapun. Sang Ibu selalu menemani setiap fase pendewasaan Hana hingga saat ini. Dimulai dari persiapan pernikahan, proses mengandung, sampai merawat anak-anaknya hingga besar. Sebagai anak yang berbakti, ia turut merawat ibunya yang saat ini berumur 73 tahun.

Dukungan keluarga

Meski bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga, Hana merasa bersyukur mempunyai suami, Frits Henry Simanjuntak, dan kedua anak, Tarida Priskila Hasian dan Samuel Balapradana Simanjuntak. Mereka selalu memberikan dukungan penuh kepada dirinya. Sosok suami juga menjadi peran kunci keberhasilan dirinya. Selain membantu mendampingi anak-anaknya di saat ia tak ada, suaminya juga turut mendukung dirinya agar segera menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang doktoral. Bahkan, sang suami juga yang membantu dirinya mengumpulkan data dan melakukan riset untuk penyusunan disertasinya.

Terkait komunikasi dengan keluarga, ia memanfaatkan waktu luang di akhir pekan sebagai *quality time* untuk anak-anaknya. Tak jarang, ia mengajak

keluarganya untuk makan atau pun menonton layar lebar bersama-sama. Terkadang ia pun turut mengajak ibunya apabila ibunya dalam kondisi yang sehat. Di sisi lain, ia juga memanfaatkan kegiatan memasak bersama ibunya agar seluruh anggota keluarga bisa makan bersama di rumah.

Harapan

Terhadap institusinya, Hana menaruh harapan besar agar di setiap penempatan, ia bisa selalu memberikan suatu sentuhan yang baru. Ia ingin agar ia dapat memberikan nilai atau manfaat lebih bagi unit kerjanya. “Saya ingin meninggalkan nilai yang baik, yang artinya bisa selalu dilanjutkan oleh siapa saja, misalnya untuk selalu memperhatikan satu dengan yang lain, selalu mengingatkan terhadap hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Hal-hal yang kecil, perhatian yang kecil, yang mungkin saja kita tidak tahu bisa berpengaruh besar bagi orang lain,” jelasnya dengan semangat kepada Media Keuangan.

Sementara itu, secara pribadi, terus terang ia ingin melakukan hal-hal yang bisa dibagikan pada siapapun. Ia terinspirasi dari sang suami yang selalu berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Menurutnya, berbagi tidak hanya terbatas pada materi.

“Kalaupun materi itu sebenarnya tidak seberapa, tetapi saya yakin dengan hal yang kecil, tetapi kalau kita berikan dengan tulus maka manfaatnya akan menjadi sangat besar. Tidak hanya terbatas pada saudara dekat, tetapi juga kepada lingkungan kita, tetangga, dan juga bisa dilakukan dengan cara berbagi ilmu,” ungkapnya.

Teks Abdul Aziz



Perlu Genjot Ekspor dan Investasi

Kegiatan ekspor perlu ditingkatkan di tengah tingginya kebutuhan impor

Foto
Anas Nur Huda

Perekonomian Indonesia semakin baik pada bulan Februari 2018. Hal ini didukung pula oleh stabilitas harga yang masih baik di tengah aktivitas ekonomi yang meningkat, persepsi positif investor yang terjaga, serta keberlanjutan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan di bidang ekonomi. Harapannya, kekuatan dan ketahanan ekonomi Indonesia tersebut akan dapat terus terjaga di tengah risiko global yang masih persisten.

Di bulan sebelumnya, berita perekonomian diwarnai oleh rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 yang secara umum dinilai masih positif. Masuk ke rilis data-data perekonomian di bulan Februari, berita positif ini masih berlanjut. Aktivitas ekonomi domestik ditengarai juga semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan impor pada bulan Februari 2018. Selama Januari hingga Februari 2018 tercatat total impor sebesar 29,5 triliun dolar AS, atau tumbuh sebesar 26,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong dari impor barang konsumsi dan bahan baku sehingga diprediksi akan memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Stabilitas internal baik, sektor eksternal masih aman

Di saat aktivitas ekonomi meningkat, inflasi rupanya terjaga cukup rendah pada kisaran 0,17 persen (*month to month*) atau sebesar 3,18 persen (*year on year*). Faktor pembentuk inflasi di

Februari 2018 ini terutama berasal dari dua faktor. Faktor pertama adalah pergerakan harga yang berasal dari bahan makanan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca serta adanya risiko ketidakmerataannya panen beras. Kedua, kenaikan permintaan masyarakat yang masih terjaga seiring dengan perkembangan harga komoditas global.

Di sisi lain, harga yang diatur pemerintah (*administered price*) juga memberikan dampak terhadap penurunan inflasi. Hal ini didukung pula dengan adanya kebijakan pemerintah c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa tidak akan ada penyesuaian terhadap kebijakan harga energi hingga tahun mendatang. Namun demikian, pemerintah ke depannya akan terus mengevaluasi berbagai kemungkinan kebijakan dalam merespon dinamika harga komoditas global.

Berbeda dengan kondisi domestik, kondisi eksternal belum menunjukkan kondisi yang sepenuhnya baik. Secara kumulatif hingga bulan Februari tahun

2018, rilis data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan impor tahunan lebih tinggi dari pertumbuhan ekspornya. Sampai dengan Februari 2018, pertumbuhan ekspor menurun dari 18,8 persen menuju 10,1 persen. Hal ini didukung pula dengan masih defisitnya neraca perdagangan di bulan Februari 2018 sebesar 872 juta dolar AS, meski nilai defisitnya telah menurun dari bulan sebelumnya.

Defisit neraca perdagangan bulanan ini disumbang dari defisit pada neraca migas yang terus terjadi sejak 2012. Meskipun di bulan Februari neraca migas sempat mengalami peningkatan karena harga minyak dunia yang kembali naik, surplus neraca perdagangan non-migas relatif rendah. Rendahnya surplus neraca perdagangan non-migas tersebut telah terjadi sejak Agustus 2017. Fakta ini perlu diwaspadai lebih lanjut terutama di tengah persistennya beberapa risiko di pasar keuangan global agar tidak berimplikasi kepada defisitnya neraca transaksi berjalan di kuartal I 2018 yang datanya akan dirilis pada April 2018.

Perekonomian global mendukung

Pergerakan harga komoditas dunia secara umum masih stabil dengan kecenderungan sedikit menurun, terutama dari sektor minyak mentah dalam bulan Februari 2018. Setelah sebelumnya sempat meningkat ke level di atas asumsi harga minyak APBN 2018, harga minyak dunia kembali turun akibat didorong meningkatnya persediaan minyak di Amerika Serikat (AS). Selain minyak, harga komoditas logam berharga dan alumunium juga cukup stabil. Dengan masih tingginya kontribusi komoditas di perekonomian Indonesia, stabilnya harga komoditas ini secara umum diperkirakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.

Di luar harga komoditas, perdagangan dunia juga menunjukkan perkembangan yang cukup kondusif. Pertumbuhan

perdagangan dari negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok, Jerman, India, Jepang, Singapura, dan AS masih menunjukkan angka positif. Meski demikian, isu penerapan kebijakan proteksi industri dalam negeri harus diwaspadai dampaknya pada kinerja perdagangan global ke depan.

Perekonomian negara-negara maju juga semakin membaik di bulan Februari. Di AS sendiri misalnya, rilis beberapa data perekonomian yang *high frequent* seperti penyerapan tenaga kerja menunjukkan data yang sangat baik. Pada bulan Februari 2018, terdapat 313.000 lapangan pekerjaan baru yang muncul baik yang berasal dari industri kecil, menengah, maupun besar. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak Juli 2016.

Terjaganya tingkat penyerapan ini mendukung tingkat pengangguran di AS stabil di tingkat 4,1 persen. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya peningkatan sektor bisnis di negara tersebut. Selain itu, kenaikan komponen inflasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK) di AS dari 2,1 di bulan sebelumnya menjadi 2,2 persen (*year on year*) di bulan Februari ini juga mengkonfirmasi optimisme sebagian besar komunitas internasional terhadap pertumbuhan ekonomi dunia yang dirilis terakhir pada Januari 2018 lalu.

Munculnya kekhawatiran

Selain menunjukkan kondisi yang membaik, positifnya rilis data perekonomian di negara maju terutama di AS juga menimbulkan kekhawatiran lain, seperti adanya risiko penyesuaian beberapa kebijakan yang bersifat memberikan insentif pada perekonomian dunia. Misanya adalah peningkatan tingkat suku bunga acuan atau Fed Funds Rate (FFR). Pada bulan sebelumnya, kekhawatiran ini menjadi kontributor utama atas terjadinya fluktuasi yang cukup tinggi di pasar keuangan global, regional, dan domestik. Bagi Indonesia, fluktuasi ini perlu menjadi perhatian.

Pada bulan Maret sampai dengan data per 19 Maret 2018, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun 1,04 persen, *yield* Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun meningkat 41 basis poin, dan Rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi 1,6 persen dari posisi akhir tahun sebelumnya. Nilai tukar Rupiah dan *yield* SUN 10 Tahun pada 19 maret 2018 secara berturut-turut ditutup pada angka Rp13.765 per dolar AS dan 6,73 persen. Pelemahan Rupiah terutama cukup mencolok di antara negara-negara di kawasan regional. Besaran depresiasi Rupiah secara *year to date* berada di nomor dua terbesar setelah Filipina yang mata uangnya terdepresiasi paling dalam di kawasan ASEAN-5.

“Merah”-nya indikator-indikator utama di pasar keuangan ini didorong oleh keluarnya aliran dana asing dari Indonesia. Di pasar saham, aliran dana yang keluar mencapai Rp 18,4 triliun. Sedangkan di pasar obligasi pemerintah, aliran dana asing masuk sebesar Rp1,81 triliun atau sangat kecil dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, sehingga secara total terdapat Rp 16,6 triliun dana asing yang keluar. Untuk tetap akomodatif terhadap perekonomian, suku bunga acuan BI yaitu *7-Day (Reverse) Repo Rate* atau 7DRR dipertahankan pada level 4,25 persen di bulan Maret 2018.

Kekhawatiran akan peningkatan FFR menjadi salah satu pemicu gejolak di pasar keuangan domestik. Di sisi lain, defisit neraca perdagangan di bulan Februari 2018 juga menjadi faktor yang menekan ke dalam negeri. Meskipun cadangan devisa masih tinggi sebesar 128 miliar dolar AS (atau mampu membiayai 8,1 bulan impor) pasca digunakan untuk stabilisasi Rupiah, ke depannya pendalaman pasar keuangan Indonesia perlu terus diupayakan agar fluktuasi pasar global dapat diredam dampaknya ke domestik.

Meningkatkan kinerja sektor eksternal

Dari rilis data yang ada, beberapa data yang perlu diberikan perhatian lebih

untuk saat ini adalah sektor ekspor. Hal ini perlu ditingkatkan di tengah tingginya kebutuhan impor untuk mendukung akselerasi kinerja investasi. Hal ini menjadi penting terutama untuk menopang daya saing perekonomian yang salah satunya tercermin dalam nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang masih berfluktuasi di awal 2018 ini.

Beberapa kebijakan perdagangan internasional, seperti penguatan lembaga pembiayaan ekspor, penetrasi ekspor ke pasar *nonmainstream* seperti Afrika dan Asia Selatan, dan optimalisasi peran Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dalam mempromosikan komoditas ekspor Indonesia diharapkan terus ditempuh untuk mendorong performa sektor ini.

Selain itu, upaya untuk menjaga iklim investasi agar investasi semakin meningkat juga diharapkan terus dilakukan untuk meningkatkan *Foreign Direct Investment* sebagai salah satu penopang neraca transaksi berjalan. Saat ini, Pemerintah sedang merombak aturan bebas pajak agar lebih akomodatif untuk mengakselerasi investasi. Terdapat setidaknya empat aturan mengenai insentif pajak yang sedang dirombak oleh pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI, yaitu *tax allowance*, *tax holiday*, insentif untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), dan pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) dan perusahaan yang melakukan pelatihan vokasi dan pelatihan tenaga kerja.

Bersamaan dengan upaya jangka menengah tersebut, pengendalian volatilitas di pasar keuangan, upaya kolaboratif dan koordinatif antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus dilakukan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.



Taufan Kurnianto
Kepala Divisi Hubungan Investor,
Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu

Reformasi ekonomi Indonesia dan prospeknya

Reformasi, khususnya di bidang ekonomi terus dilakukan sampai dengan saat ini dan seterusnya dalam upaya menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan dan inklusif. Di tahun 2018 ini, hasil reformasi yang terus-menerus ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu bertahan di 5,07 persen pada 2017 dan diharapkan tumbuh menjadi 5,4 persen di 2018. Selain memperhatikan pengaruh ekonomi global, pertumbuhan tahun 2018 juga akan ditopang oleh tiga hal, yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor.

Konsumsi yang stabil yang sepanjang 3 tahun terakhir tumbuh rata-rata 5 persen serta didukung dengan daya beli yang diharapkan juga stabil. Stabilitasnya daya beli ini dikarenakan relatif berkurangnya faktor utama pendorong meningkatnya inflasi seperti tahun lalu, yaitu naiknya tarif listrik. Tahun 2018, pemerintah berkomitmen untuk tidak akan menaikkan harga yang diatur pemerintah seperti listrik dan bahan bakar minyak sehingga inflasi diproyeksikan pada angka 3,5 persen lebih rendah dari 2017 sebesar 3,6 persen.

Dari sisi investasi, tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan tertinggi sejak dua tahun terakhir, yaitu 6,15 persen. Ini menunjukkan bahwa dampak dari beberapa reformasi ekonomi yang dilakukan beberapa tahun terakhir ini sudah menuai hasil dengan tumbuhnya kepercayaan diri investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Reformasi yang berkaitan dengan investasi yang paling utama

adalah dengan terbitnya paket-paket kebijakan yang sampai dengan paket ke-16. Selain itu, masuknya Indonesia dalam *Investment Grade* dari seluruh lembaga pemeringkat utama dunia, turut menambah optimisme investor. Informasi penting lainnya adalah pengumuman dari Bloomberg Barclays Indices bahwa Surat Utang Negara (SUN) Indonesia sudah masuk dalam Global Aggregate Bond Index (indeks untuk negara-negara yang masuk *investment grade* dengan kriteria tertentu). Dampaknya, surat utang Indonesia akan lebih dikenal oleh investor dan pasar.

Faktor penting lain pendukung pertumbuhan ekonomi adalah ekspor yang tumbuh 9 persen di tahun 2017. Nilai ini merupakan yang tertinggi semenjak tiga tahun terakhir. Tahun 2018 ekspor dapat tumbuh karena dipengaruhi faktor perbaikan harga komoditas dan permintaan. Di sisi lain, angka ini juga disertai dengan risiko hambatan dagang berupa pengenaan tarif produk Indonesia, seperti minyak sawit mentah atau CPO.

Tantangan selanjutnya adalah sentimen terhadap *Emerging Economies* yang salah satunya berasal dari dampak kenaikan maupun rencana kenaikan suku bunga The Fed yang turut menjadi penyebab volatilitas rupiah dalam beberapa minggu terakhir. Selain itu, meningkatnya proteksionisme di beberapa negara dunia, terbaru dengan diterapkannya tarif impor baja sebesar 25 persen dan aluminium sebesar 10 persen oleh AS, juga dapat mempengaruhi perdagangan dunia, termasuk Indonesia.

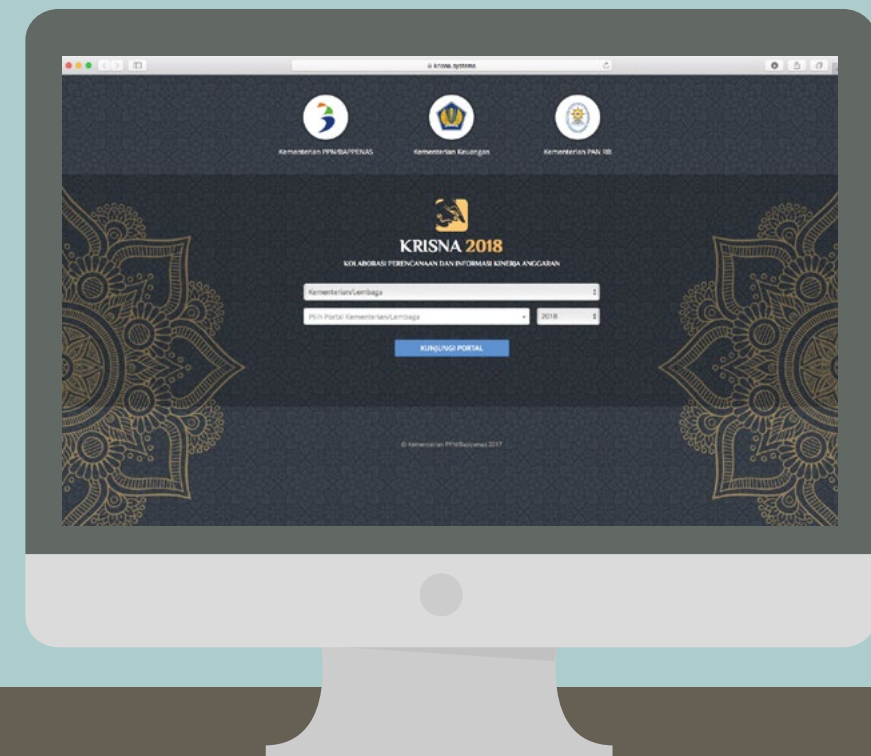
**) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja*

Teks Adelia Pratiwi
Staf Khusus Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Semangat Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional melalui Aplikasi

KRISNA

WWW.KRISNA.BAPPENAS.GO.ID





APBN yang Inklusif dan Berkelanjutan

Joko Tri Haryanto,
*pegawai Badan Kebijakan Fiskal *)*

Tema yang dipilih oleh Pemerintah di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 adalah ”Pemantapan Pengelolaan Fiskal Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”. Beberapa isu utama yang dijadikan arahan di antaranya adalah produktif, efisien, berdaya tahan dan risiko terkendali. Produktif dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kontribusi pendapatan negara melalui optimalisasi *tax ratio*, peningkatan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan aset-aset negara. Sementara efisien dan berdaya tahan ditujukan untuk menciptakan belanja negara yang berkualitas serta mumpuni dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi risiko yang terkendali melalui penciptaan mekanisme pembiayaan, baik dari domestik maupun dari internasional.

Penerimaan
devisa sektor
parawisata
diperkirakan
akan menjadi
penyumbang
devisa di tahun
2020.

Foto
Arfindo
Briyan. S

Pemilihan tema strategis tersebut dirasa sangat *urgent*, mengingat tahun 2018 ini masuk pada periode akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di era Presiden Jokowi. Tantangan yang menghadang pun sekiranya bukannya bertambah mudah, namun justru semakin membesar, khususnya yang terkait dengan berbagai persoalan akses pangan/kesehatan/pendidikan gratis bagi masyarakat miskin, dampak perubahan iklim yang semakin nyata, disparitas penduduk terhadap akses permodalan, kondisi geografis yang bervariasi, perubahan struktur ekonomi dan lapangan kerja, serta munculnya gelombang ekonomi berbasis teknologi digital. Maraknya isu demokratisasi dan peningkatan kesetaraan pun akhirnya makin menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menyiapkan segala pranata dan regulasi terkait hal-hal tersebut.

Seiring dengan kondisi eksternal yang masih diliputi ketidakpastian, upaya meningkatkan daya tahan APBN melalui peningkatan produktivitas pendapatan negara serta penajaman efisiensi dan efektivitas belanja negara wajib diapresiasi. Upaya mewujudkan sebuah anggaran yang inklusif dan berdaya tahan memang kemudian disepakati untuk dijadikan ujung tombak pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai amanat konstitusi UUD 1945. Tentu didukung dengan reformasi birokrasi, transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang melayani.

APBN inklusif dan berkelanjutan

Isu mengenai APBN dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif memang menjadi perbincangan kuat dewasa ini. Secara teori, isu pertumbuhan inklusif tersebut muncul dan menguat sebagai bentuk koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi konvensional yang dirasa justru makin menyisakan permasalahan besar khususnya di bidang lingkungan hidup, SDA, dan sosial. Dalam beberapa literatur ilmiah, beberapa pakar menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi konvensional lebih didominasi paradigma ”pasar sebagai alokasi sumber daya untuk *output* yang lebih efisien”. Akibatnya pembangunan melahirkan dampak sosial secara serius sekaligus pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) seperti kemiskinan, ketimpangan, konflik sosial, serta persoalan lingkungan, termasuk ancaman perubahan iklim dan merosotnya keragaman hayati.

Dalam lingkup ini, ”pertumbuhan hijau (*green growth*)” yang didengang-dengungkan pun dirasa tidak mampu mewakili besarnya kerusakan sosial dan menipisnya cadangan SDA, sehingga kemudian dipilih istilah ”pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*)”. Pertumbuhan inklusif diharapkan mampu menghasilkan spektrum yang lebih luas daripada sekedar pertumbuhan hijau, termasuk permasalahan sosial akibat eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan dengan mengatasmakan pertumbuhan ekonomi. Sebagai dasar regulasi pengembangan pertumbuhan inklusif, Badan PBB untuk Lingkungan (UNEP) dalam pertemuan Rio+20 kemudian meluncurkan indikator pencapaian berupa *Inclusive Wealth Index* (IWI) atau Indeks Kekayaan Inklusif. IWI pada dasarnya memfokuskan perhatiannya pada pencapaian hakiki terciptanya kesejahteraan masyarakat antargenerasi (*sustainable wealth*).

Dalam buku *An Introduction to Sustainable Development*, nomenklatur keberlanjutan ini dipilih sebagai sebuah jembatan penghubung antara proses pembangunan yang terjadi di sebuah negara dengan upaya menjaga kelastarian lingkungan dan kohesi sosial. Istilah keberlanjutan pun awalnya diambil dari konotasi yang cukup populer di sektor kehutanan dan perikanan terkait dengan berapa jumlah maksimum pohon yang boleh ditebang atau ikan yang dapat dipanen dengan tetap memperhatikan kebutuhan generasi berikutnya (*maximum sustainable cut/maximum sustainable yield*).

Jadi memperhatikan aspek keberlanjutan antar generasi kemudian menjadi kata kunci yang wajib diimplementasikan.

Di tahun 1993, Mohan Munashinge kemudian memperkenalkan tiga pilar utama penciptaan aspek keberlanjutan yang terdiri dari aspek: *economy* (memaksimalkan pendapatan dengan tetap mengupayakan kenaikan akumulasi modal), *ecology* (memaksimalkan daya tahan keanekaragaman hayati dan sistem fisik lingkungan serta *social* (menjaga stabilitas sosial dan aspek budaya). Disusun juga peta jalan mencapai aspek keberlanjutan dalam pembangunan yang diantaranya menjelaskan tentang upaya internalisasi eksternalitas, penerapan prinsip *polluter pays* serta pembangunan yang tetap memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung (*carrying capacity*) lingkungan hidup.

Di era Presiden Jokowi, upaya nyata menciptakan APBN yang inklusif dimulai sejak pemerintah menyatakan migrasi dari ekonomi berbasis SDA menuju era ekonomi berbasis jasa. Sektor perpajakan kemudian dipilih menjadi prioritas utama pendanaan APBN menggantikan kontribusi SDA yang semakin lama semakin menurun. Dalam banyak kasus, era ekonomi berbasis kekayaan sumber daya alam (SDA) khususnya pertambangan, memang tak selamanya dapat diandalkan. Data yang dirilis Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2014 misalnya, menyebutkan bahwa kontribusi devisa minyak bumi justru terus menurun dari tahun 2015 hingga 2019. Begitu halnya dengan

APBN memiliki peran yang sangat signifikan bagi pemerintah dalam melakukan berbagai intervensi pembangunan demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

kontribusi SDA lainnya seperti batu bara, kelapa sawit /Crude Palm Oil (CPO) dan karet. Jika dihitung dengan biaya internalisasi akibat dampak eksternalitas yang dihasilkan, nilai devisa tersebut jelas akan semakin berkurang.

Yang terus meningkat perlahan namun pasti justru penerimaan devisa sektor pariwisata. Sejak tahun 2017, kontribusi pariwisata bahkan sudah melebihi sumbangan devisa sektor SDA dan diperkirakan akan menjadi penyumbang devisa terbesar di tahun 2020. Berdasarkan lapangan usaha, sejak 2016 sektor pariwisata juga sudah menempati peringkat ke-2 sektor utama di dalam PDB setelah CPO, dengan nilai sebesar 13.568 juta dolar AS. Di bawahnya berturut-turut sektor migas, batu bara, pakaian jadi, alat listrik, perhiasan dan kertas. Tak heran jika pemerintah kemudian mulai menjadikan sektor-sektor berbasis jasa seperti pariwisata sebagai sektor masa depan Indonesia. Kebetulan Indonesia juga dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa untuk menarik minat para wisatawan baik manca negara maupun domestik.

Sebagai sebuah mekanisme penganggaran, APBN memiliki peran yang sangat signifikan bagi pemerintah dalam melakukan berbagai intervensi pembangunan demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari sisi pendapatan negara, APBN dapat memberikan dukungan bagi akselerasi pembangunan melalui berbagai skema insentif/dis-insentif pajak dan non-pajak. Sementara dari sisi belanja negara, APBN dapat memberikan intervensi melalui kebijakan subsidi dan penganggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah yang diharapkan mampu mengkreasikan sisi *demand* sebagai salah satu penentu pertumbuhan ekonomi. Begitupula peran dari sisi pembiayaan baik tidak langsung maupun langsung melalui peran investasi pemerintah.

Upaya menjadikan belanja negara yang lebih berkualitas diharapkan mampu menjadi dorongan bagi APBN untuk lebih mampu memainkan peran pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lahan namun pasti, alokasi belanja birokrasi khususnya yang bersifat rutin di dalam APBN 2018 mulai dikurangi. Belanja aparatur yang ada lebih ditujukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara antara lain melalui gaji ke 13 dan pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun. Selain itu juga diarahkan bagi upaya pemenuhan aspek profesionalisme aparatur sesuai amanat UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Dilihat dari alokasi belanja per fungsi, kenaikan paling signifikan dinikmati oleh fungsi pelayanan umum demi pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah termasuk kepada pihak ketiga, fungsi ekonomi untuk memberikan daya dorong akselerasi pertumbuhan serta fungsi kesehatan untuk mendukung pelaksanaan program kefarmasian serta alat kesehatan melalui

penyediaan vaksin baru sekaligus pengalihan penyuluh/petugas lapangan KB dari daerah ke pusat. Pemerintah juga tetap komitmen untuk terus meningkatkan alokasi belanja pendidikan menjadi Rp444,1 triliun, belanja kesehatan menjadi Rp111,0 triliun, belanja infrastruktur Rp410,4 triliun.

Tak kalah, belanja perlindungan sosial juga dinaikkan menjadi Rp283,8 triliun dengan sasaran Program Keluarga Harapan (10 juta KPM), Bantuan Pangan (15,6 juta KPM), Bantuan iuran JKN (92,4 juta jiwa), Program Indonesia Pintar (19,6 juta siswa), Dana Desa (74.958 desa) dan Bidik Misi (401,7 ribu mahasiswa). Sementara belanja-belanja subsidi juga mengalami penyesuaian. Subsidi energi turun hingga Rp8,8 triliun sementara subsidi non-energi justru meningkat menjadi Rp61,7 triliun dengan rincian subsidi bunga kredit program, Rp18,0 triliun, subsidi pupuk Rp28,5 triliun sementara subsidi PSO sekitar Rp4,4 triliun.

Sebagai bentuk pelaksanaan Nawacita “membangun dari pinggirian”, pemerintah terus meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa menjadi Rp706,2 triliun dengan alokasi DAU sebesar Rp401,5 triliun, DBH Rp89,2 triliun, DAK Fisik Rp62,4 triliun, DAK Non-Fisik Rp123,5 triliun, DID Rp8,5 triliun serta Dana Otsus Keistimewaan DIY Rp21,1 triliun.

Dengan segala kelimpahan dukungan yang telah diberikan oleh APBN, seyogyanya seluruh elemen bangsa dan negara bersama-sama untuk ikut mendukung dan mengawasi dari aspek implementasinya. Dengan semangat kerjasama yang semakin harmonis, sekiranya penulis yakin bahwa visi Indonesia 2045 akan segera terwujud, sebuah bangsa Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, sesuai amanat konstitusi UUD 1945.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

Gold Winner

Majalah Media Keuangan meraih dua Gold Winner dalam acara InMA (Inhouse Magazine Award) 2018 di Padang pada 7 Februari 2018

Gold Winner Kategori The Best of Government Inhouse Magazine

Gold Winner Kategori The Best of E-Magazine



Mimpi yang Menjadi Nyata

Melanjutkan studi di luar negeri merupakan mimpi Soni Ariawan sejak di bangku kuliah. Soni banyak mendapatkan cerita Inspiratif dari dosennya yang merupakan lulusan luar negeri. Selain itu, Soni kerap membaca novel-novel yang menceritakan suka duka menempuh pendidikan di luar negeri. Kombinasi kedua hal ini lantas membulatkan tekadnya untuk melanjutkan jenjang S2 melalui beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) di School of Education the University of Adelaide di Australia Selatan.

Bagi Soni, LPDP adalah jembatan penghubung untuk meraih angan yang terpendam. Apalagi, LPDP membuka kategori afirmasi untuk pelamar yang berasal dari daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Daerah asal Soni, provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk di dalamnya.

Dari sini, Soni mulai berkeyakinan bahwa LPDP bukan hanya sekedar sponsor beasiswa, tetapi memiliki komitmen besar

untuk mengembangkan SDM Indonesia khususnya di daerah 3T. Alasan lain yang cukup logis untuk dipertimbangkan olehnya adalah LPDP memberikan tunjangan keluarga. Pencairan tunjangan juga selalu tepat waktu.

Perbedaan kultur akademik, budaya, dan bahasa menjadi tantangan yang sering ditemui siapapun yang menempuh pendidikan di luar negeri. Namun demikian, menurut Soni, seiring berjalan waktu, ia cukup mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. “Tantangan lain juga yang saya temui adalah keadaan cuaca yang sangat ekstrem berbeda dengan di Indonesia,” kata Soni.

Meski begitu, Soni melihat semua tantangan tidak menyurutkan semangat pelajar Indonesia untuk bersaing dengan pelajar yang berasal dari negara lain. Soni menuturkan, di dalam kelas yang ia hadiri pelajar Indonesia sangat aktif berdiskusi serta menyumbangkan ide dan pemikirannya. “Tidak sedikit mahasiswa Indonesia yang mendapat nilai memuaskan. “Jadi, secara SDM, Indonesia mempunyai harapan besar untuk bersaing secara global,” kata Soni.

Semangat Bersekolah

Sejak kecil, Soni berharap untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Sebab, tidak banyak anggota keluarganya yang mengecap bangku sekolah. Bahkan, lulus Sekolah Dasar pun tidak. Soni harus berusaha keras untuk membuat mimpinya terwujud, meski harus berkorban waktu, biaya transportasi, dan tenaga. Ia bahkan sempat bermalam di salah satu warung internet yang letaknya cukup jauh dari tempat tinggalnya untuk mengirim berkas administrasi.

Soni Ariawan yang berasal dari Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB kemudian harus menjalani proses wawancara di kota Surabaya. Untuk mengikuti seleksi wawancara di luar kota tentu memakan biaya transportasi yang tidak sedikit. Bayangkan, saya sampai pinjam uang untuk biaya tiket dan belum tentu lulus karena persaingannya sangat ketat. Namun, dengan modal keyakinan dan kemauan untuk berkorban ternyata saya lulus,” kenang Soni.

Tertarik Bahasa dan Budaya

Latar belakang pendidikan Soni sebelumnya adalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Mataram. Ia memang menyenangi bidang bahasa, pendidikan, literasi, dan budaya. Soni berpandangan, dalam proses menuju negara maju, Bahasa Inggris memiliki peranan penting bagi Indonesia sebagai alat komunikasi dengan dunia global.

Soni mengatakan, mempelajari bahasa Inggris tidak berarti meninggalkan

budaya lokal dan nasional atau cenderung untuk lebih bangga dengan budaya negara-negara yang berbahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris bukan menyerap semua bentuk budaya dan karakter dari barat, tetapi mengambil bentuk positif budaya barat.

Fenomena relasi antara pendidikan, bahasa, dan budaya ini menarik Soni untuk mengkajinya lebih dalam. Sebab itulah Soni kemudian mengambil jenjang S2 di Universitas Adelaide dengan spesialisasi Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL).

Pendidikan Untuk Anak Desa

Soni aktif dalam berbagai organisasi saat menempuh pendidikan S2 di Australia, salah satunya adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia-Australia (PPIA) cabang Universitas Adelaide di Australia Selatan. Ia terpilih menjadi Presiden pada semester 1 di bulan Maret 2016. Soni juga aktif sebagai Sekretaris Masyarakat Islam Indonesia Australia Selatan (MIIAS) pada tahun 2017. Selain itu, ia menjadi relawan beberapa festival khususnya festival masyarakat Indonesia di Australia selatan.

Sebelum Soni berangkat ke Australia, tahun 2013 ia telah merintis sebuah perpustakaan di desa tempat tinggalnya. Pada tahun 2015 wadah ini kemudian berkembang menjadi *Gelora Education Center* (GEC), sebuah pusat pendidikan untuk anak-anak di desanya.

Kegiatan utama GEC adalah memberikan bimbingan belajar Bahasa Inggris dan MIPA. Anak-anak di desa yang

ingin belajar cukup membayar Rp25 ribu rupiah per bulan. Soni memberdayakan enam orang teman pemuda dari desanya untuk mengajar.

Keuntungan yang didapat dari lembaga ini selain digunakan untuk menggaji guru, juga digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak yang tidak mampu. “Sudah ada 1 anak didik dari GEC yang berhasil kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram berbekal beasiswa dari GEC. Sekarang dia menjadi salah satu penerima beasiswa Dompot Dhuafa,” ujar Soni gembira.

Selain itu, 1 anak didik yang juga mendapatkan beasiswa penuh dari GEC di sebuah pondok pesantren setingkat SMU dan sekarang sudah hafidz 30 juz. GEC juga memberikan bantuan pendidikan secara berkala berupa alat tulis dan perlengkapan sekolah lainnya kepada lebih dari 50 anak.

Sepulang dari Australia nanti Soni beriktikad untuk mengembangkan GEC agar dampak sosialnya lebih luas lagi. Selain itu, Soni sudah mendapat amanah untuk menjadi Ketua Mata Garuda Provinsi NTB, sebuah organisasi penerima dan alumni LPDP. Gelar Master yang sudah diraih oleh Soni Apriwan adalah modal awal baginya untuk mengambil peranan lebih banyak dalam masyarakat. “Melalui organisasi saya akan ikut serta membangun daerah bersama dengan alumni LPDP yang lain,” tutup Soni.

Teks Irma Kesuma Dewi

Soni Ariawan bersama keluarga kecil.

Foto
dok. pribadi.



Peluang Ekonomi Industri Sepak Bola Nasional

Teks Harlinda Siska Pradini, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Ilustrasi
Dimach Putra

Dalam industri sepak bola, suporter menjadi keunikan tersendiri. Pendukung sepak bola adalah konsumen loyal, tidak mudah beralih pada kompetitor, sekalipun klub favoritnya menelan kekalahan. Dengan kata lain, suporter menjadi pemangku kepentingan utama. Mereka tidak hanya mendukung jalannya pertandingan, namun berkontribusi finansial, baik langsung maupun tidak langsung. Sepak bola menjadi magnet tersendiri bagi para pecintanya. Dialog tentang sepak bola tidak hanya sebatas pada olahraga namun juga aspek ekonomi.

Industri Sepak Bola dalam Sudut Pandang Ekonomi

Sepak bola sebagai olahraga populer di dunia menjadi industri yang sedang berkembang secara global (Manoli and A.Antonopoulos, 2016). Didukung dengan perubahan teknologi, perkembangan media, serta proses globalisasi, sepak bola mampu menyedot perhatian publik di berbagai belahan

dunia. Sepak bola bukan lagi kompetisi olahraga murni namun berkorelasi dengan lingkungan ekonomi, struktur sosial politik dan dampak budaya (Lardo et al, 2017).

Riset Omondi-Ochieng (2015) meneliti hubungan antara kemakmuran ekonomi negara dengan akuisisi pekerja sepak bola. Kemakmuran ekonomi diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, sementara pekerja sepak bola diindikasikan oleh jumlah pemain amatir, klub bola, dan pemain profesional.

Selain itu, riset ini juga memprediksi kinerja sepak bola atau kualifikasi di kejuaraan sepak bola kontinental berdasarkan PNP per kapita dan pekerja sepak bola. Argumentasi penelitian ini adalah negara dengan kesejahteraan ekonomi lebih tinggi sering tampil lebih baik dalam perhelatan internasional karena mampu menggunakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan.

Teori modal manusia menyatakan investasi untuk memperoleh pengetahuan dan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan penyediaan infrastruktur akan meningkatkan efektifitas pekerja, termasuk karir, kesuksesan dan besaran upah.

Dalam proses pembentukan kualitas pemain, manajemen klub bola turut berperan dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan, mengelola, membimbing, memotivasi serta memilih, melatih, mengevaluasi dan menyusun strategi untuk memenangkan pertandingan. Manajemen klub sepak bola ini meliputi administrator, pelatih, teknisi dan petugas medis.

Aktivitas Ekonomi di Dalam Klub

Perspektif ekonomi dalam industri sepak bola tidak hanya terkait dengan makro ekonomi, namun juga aktivitas

ekonomi di dalam klub. Terdapat tiga tumpuan finansial klub sepak bola (Amir and Livne, 2005). Pertama, penjualan tiket, penyiaran atau hak siar, sponsor, iklan, dan barang dagangan baik produk maupun jasa. Kedua, akuisisi atau pelepasan kontrak pemain. Ketiga, pengembangan bakat pemain muda.

Di Inggris, beberapa klub sepak bola mendapatkan pendanaan dari pinjaman bank, masuk ke pasar obligasi, penerbitan sekuritas dengan jaminan aset klub, atau pinjaman dari pemilik dengan tingkat suku bunga rendah atau bahkan nol persen (Cooper and Johnston, 2012). Manchester United sebagai salah satu klub unggulan dunia sejak tahun 1991 telah terdaftar di Bursa Efek New York. Ketika menjadi industri yang masuk bursa, klub sepak bola dituntut untuk mampu menjaga kepercayaan investor guna membangun reputasi dan kinerja yang positif.

Amir and Livne (2005) menemukan hubungan positif antara nilai pasar saham dan investasi dalam kontrak pemain. Biaya transfer menjadi konsekuensi yang timbul dari adanya akuisisi atau pemindahan pemain dari satu klub ke klub lainnya. Dalam industri sepak bola, biaya transfer menjadi beban terbesar kedua setelah biaya gaji (Pavlovic et al, 2014).

Dalam rumpun ilmu akuntansi, biaya perpindahan pemain menjadi area kontroversial dalam pelaporan keuangan. Perlakuan akuntansi bagi biaya transfer tergantung pada proses identifikasi dan biaya yang muncul saat registrasi pemain. Apabila akuisisi pemain diperlakukan sebagai aset, maka biaya transfer dianggap sebagai biaya perolehan. Namun jika tidak, biaya transfer bisa diperlakukan sebagai beban pada periode tersebut atau beban operasional atau biaya luar biasa.

Ketika diakui sebagai aset, maka dapat dicatat sebagai aset tak berwujud atau

aset lancar. Pengakuan transfer pemain sebagai aset tak berwujud dan akan diamortisasi selama jangka waktu kontrak. Keuntungan atau kerugian dari penjualan kontrak diakui sebagai keuntungan atau kerugian serupa dengan penjualan aset tetap.

Manakala kontrak pemain diakui sebagai beban, maka pembelian (penjualan) kontrak pemain akan dicatat sebagai beban (pendapatan) secara terpisah. Pengungkapan akuisisi atau pelepasan pemain dapat berimbas pada kepercayaan investor karena mempengaruhi prediksi pendapatan masa depan dan penilaian resiko investasi (Lardo et al, 2007)

Kesimpulan

Klub sepak bola dituntut untuk memperkuat kapabilitas finansialnya. Pendapatan yang tinggi akan memberikan kemampuan bagi klub. Misalnya saja untuk membeli, melatih atau menghasilkan pemain terbaik guna memenangkan kompetisi dan berpartisipasi dalam kejuaraan bergengsi sepak bola. Klub dengan pemain bintang akan menarik perhatian media dan penggemar sepak bola. Dengan sendirinya hal ini akan meningkatkan hak siar televisi, serta menambah sponsor baru guna menaikkan pendapatan komersial dan keuntungan klub (Hamil et al, 2004).

Belajar dari pengembangan manajerial industri sepak bola di negara-negara maju, Indonesia perlu melakukan inovasi dari sisi manajemen finansial. Pendanaan industri sepak bola nasional dapat diperluas ke sektor pasar modal dan obligasi. Dengan memperluas keterlibatan investor maka industri sepak bola nasional dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangannya.

Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan Untuk Perpajakan Diperkuat

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi lembaga jasa keuangan (LJK), lembaga jasa keuangan lainnya dalam menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, pada 19 Februari 2018 Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (PMK Nomor 19/2018). Aturan ini merupakan regulasi sekunder untuk menjamin efektivitas keterlibatan Indonesia dalam pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang akan berlaku mulai September 2018.

Lembaga Jasa Keuangan Pelapor dan Nonpelapor

Dalam era keterbukaan informasi, pertukaran informasi keuangan yang dilakukan berdasarkan perjanjian internasional dilaksanakan untuk mencegah penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda oleh pihak yang tidak berhak, dan atau mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib

pajak. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan secara otomatis berdasarkan perjanjian internasional dimaksud, baik bilateral maupun multilateral.

Akses informasi keuangan didapatkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari lembaga keuangan pelapor yang terdiri dari LJK yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LJK lainnya, dan/atau entitas lainnya. Lembaga keuangan pelapor maupun lembaga keuangan nonpelapor wajib mendaftarkan diri kepada Ditjen Pajak. Lembaga keuangan pelapor antara lain lembaga keuangan sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya seperti lembaga keuangan mikro, entitas lain seperti koperasi simpan pinjam dan pialang perdagangan berjangka, serta entitas lain. Adapun lembaga keuangan nonpelapor yang wajib mendaftarkan diri antara lain entitas pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, dana pensiun dari organisasi internasional *trust*, kontrak investasi kolektif yang dikecualikan, maupun LJK lain selain yang sudah disebutkan.

Dua Puluh Pokok Perubahan

Secara total, terdapat 20 (dua puluh) pokok perubahan pada PMK Nomor

19/2018 yang mengubah dan/atau menambah ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam PMK No.70/2017 dan PMK No.73/2017. Poin perubahan mencakup rekomendasi dari Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes maupun masukan dari lembaga keuangan. Rekomendasi dari Global Forum meliputi penyesuaian jangka waktu dokumentasi atas implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) agar sesuai dengan Common Reporting Standards (CRS), penyesuaian definisi, khususnya terkait *Reportable Account* dan *Reportable Person*, materi muatan di dalam batang tubuh PMK agar konsisten dengan lampiran PMK dan sesuai dengan CRS, dan mengubah terminologi “dimiliki oleh” menjadi “dipegang oleh (*held by*)” terkait definisi pemegang rekening keuangan. Adapun masukan dari lembaga keuangan antara lain memperjelas ketentuan dengan istilah pada CRS, penegasan kontrak investasi kolektif, memperjelas prosedur identifikasi aset keuangan yang dijual melalui agen penjual, menyesuaikan ketentuan *self certification* untuk memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan dalam implementasi, memperjelas ketentuan terkait pembetulan laporan, memperjelas ketentuan nilai tukar apabila tidak

tersedia pada kurs tengah Bank Indonesia, dan menambahkan penegasan dan memperjelas prosedur penanganan sanksi pidana.

Atas penyampaian informasi keuangan secara otomatis, pimpinan lembaga keuangan bertanggung jawab atas pemenuhan penyampaian laporan. Dalam rangka pelaporan, pimpinan lembaga keuangan pelapor dapat menunjuk atau menetapkan pejabat di bawahnya sebagai petugas pelaksana penyampaian informasi keuangan, yang dalam pasal 24 ayat (5) PMK No. 19/2018 juga turut bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban penyampaian laporan. Untuk mempertegas aturan penghindaran pelaporan, PMK No.19/2018 menambahkan pasal baru yaitu pasal 24A, yang berisi pelarangan lembaga jasa keuangan melakukan penghindaran kewajiban dan membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan.

Batasan Saldo Minimal Berubah

Salah satu perubahan pokok dalam PMK No. 19/2018 yaitu pada pasal 19 ayat (4) yang mengatur batasan saldo minimal atau nilai rekening keuangan orang pribadi yang wajib dilaporkan yaitu

Rp1 miliar rupiah, atau dengan mata uang asing yang nilainya setara. Sedangkan pada pasal 19 ayat (1) PMK No.19/2018, informasi yang perlu dilaporkan kepada Ditjen Pajak paling sedikit memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas LJK, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Aturan Administrasi Diperkuat

Secara administrasi, terdapat beberapa poin penting perubahan aturan dalam PMK No.19/2018 seperti penegasan kewajiban lembaga keuangan pelapor atas penerbitan rekening keuangan baru, dan kewajiban memenuhi prosedur identifikasi rekening keuangan oleh agen penjual jika terkait aset keuangan yang dijual melalui agen penjual, dan sebagainya.

Terhadap pelaporan yang diterima, Ditjen Pajak berwenang untuk meminta klarifikasi apabila terdapat indikasi pelanggaran atas pemenuhan kewajiban. Apabila terdapat keterlambatan penyampaian permintaan klarifikasi, dalam pasal 32 disebutkan Ditjen

Pajak berwenang menyampaikan teguran tertulis, dan tindak lanjut atas teguran tertulis dituangkan dalam

bentuk laporan. Dalam ketentuan pemeriksaan kepatuhan, Ditjen pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, pemeriksaan bukti permulaan dilanjutkan dengan proses penyidikan. Selain pemeriksaan atas bukti permulaan, Ditjen Pajak dapat pula melaksanakan pemeriksaan atas kepatuhan. Dalam Pasal 34A disebutkan Ditjen Pajak melaksanakan pemeriksaan apabila ada indikasi pelanggaran atas pemenuhan kewajiban indikasi pelanggaran pemenuhan kewajiban dan larangan.

Penutup

PMK No.19/2018 disusun sebagai komitmen peran serta Indonesia dalam era keterbukaan informasi yang bersifat global. Dalam aturan ini, peran lembaga keuangan untuk mendukung gerakan transparansi global demi kepentingan perpajakan menjadi hal yang harus dilaksanakan.

Teks Budi Sulistyo

Ilustrasi Akhsan Akbar

Fokus Mengajar Pelajar Sekolah Marjinal

Berbicara tentang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, pasti yang terbayang adalah gunung sampah yang memiliki aroma menyengat. Bagi warga yang tinggal dan menggantungkan mata pencahariannya di tempat itu tentu saja hal itu bukanlah pilihan. Namun bagi orang luar, pasti jadi tantangan tersendiri ketika harus turun langsung memasuki lingkungan tersebut.

Adalah Aditya Eka Maulana seorang relawan sosial yang harus membiasakan dirinya berada di tengah lingkungan kumuh tersebut. Di hari Kerja, ia mengabdikan dirinya sebagai PNS di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Namun sudah hampir empat tahun ini bersama beberapa teman relawan lain, ia meluangkan waktu akhir pekannya untuk mengajar di SD Dinamika Indonesia. Sekolah nirlaba hasil kerja sama Indonesia dan Jepang yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan formal dasar bagi anak-anak yang menetap di lingkungan sekitar TPST Bantar Gebang.

Program mulia yang dikelola oleh pria yang akrab dipanggil Adit itu diberi nama Serambi Inspirasi (SI). Dibantu dengan tim inspirator yang dibentuknya, ia mengajarkan materi-materi pembentukan karakter dan minat bakat. "Intinya tugas kami adalah memotivasi mereka. Masalahnya, saat sudah bisa baca, tulis,

dan hitung mereka akan selesai dengan sekolahnya. Biasanya sampai kelas 3 saja. Kebanyakan akan mengikuti profesi orang-orang di lingkungannya, memulung sampah," ucapnya menyesali.

Lalui awal yang penuh aral

Pria berkacamata ini menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam program ini adalah karena kiprah aktifnya di beragam komunitas yang peduli masalah-masalah sosial. Sejak SMA ia telah bergabung dengan organisasi-organisasi sosial di lingkungan sekolahnya. Itu berlanjut hingga ia melanjutkan studi di jurusan akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Menjelang lulus, Adit mulai melebarkan sayapnya, masuk ke organisasi-organisasi di luar lingkungannya menimba ilmu.

Sekitar tahun 2012, pria berusia 27 tahun ini bergabung dengan komunitas Pecinta Anak Yatim (PAY). Di komunitas tersebut, ia bertemu rekan sesama relawan sosial untuk menggerakkan program baru dari Dompot Dhuafa Volunteer (DDV). Idenya adalah menjadi pengajar untuk kegiatan akhir pekan di kawasan Bantar Gebang untuk program Serambi Inspirasi. Pada Oktober tahun 2014, Adit diberi amanah menjadi Ketua pertama Serambi Inspirasi

Adit mengakui, masa-masa awal menjalankan Serambi Inspirasi (SI) yang berada di bawah naungan DDV

itu memang penuh liku dan rintangan. Tantangan pertama berasal dari pihak sekolah yang mereka gandeng. Meski sudah mendapat izin, perwakilan sekolah sempat meragukan keseriusan Adit dan teman-temannya. Pasalnya, bukan pertama kali bagi sekolah ini menerima program bantuan mengajar dari luar. Sayangnya, kegiatan serupa dari beberapa instansi terdahulu hanya mampu bertahan seumur jagung.

"Pertama kali datang dulu, Pak Nasrudin (Kepala SD Dinamika Indonesia) membandingkan kami dengan program lain yang pernah berjalan di sini. Semuanya hanya bertahan tiga bulan. Tapi saya berjanji ke beliau dan akan membuktikan bahwa kami bisa bertahan lama. Sekarang sudah berjalan empat tahun. *Alhamdulillah* bisa seperti itu," ucapnya sambil tersenyum bangga. Keberhasilan ini tentu saja berkat inovasi-inovasi penyampaian materi pembelajaran yang berhasil dirumuskan tim SI. Anggotanya terdiri dari orang-orang dari beragam disiplin ilmu, usia, dan latar belakang.

Selain keraguan dari pihak sekolah, Adit dan tim relawan lainnya juga sempat mendapatkan resistensi dari keluarga para siswa. Di masa awal, beberapa wali murid datang menjemput anaknya di tengah-tengah proses belajar. Mereka ingin anak-anaknya membantu pekerjaan orang tua saja.



Adit memotivasi relawan program STIS Mengajar

Memandu acara Jambore Anak Indonesia 2016

Foto Dok. pribadi

Foto Anas nur Huda

"Udah ya, Mas. *Gak bisa* ngasih kami uang, *kan?* *Kan* saya sama anak-anak harus *nyari* uang. Senin sampai Jumat udah *full*, masa Sabtu juga belajar lagi?" kenangnya. Dia mengakui bahwa sambutan semacam sudah biasa didapatnya dari para orang tua/wali murid. Hal tersebut membuatnya miris tapi juga memacu semangatnya untuk dapat membuktikan bahwa program yang dibawanya ini penting dan dibutuhkan oleh anak-anak di sana.

Salah satu cara yang dilakukan Serambi Inspirasi untuk mendapatkan simpati dari warga adalah dengan mengadakan Warna-Warni Inspirasi (WWI). Acara unjuk bakat ini menjadi ajang untuk menampilkan kemampuan para siswa berdasarkan yang mereka pelajari di kelas yang diadakan SI. Dengan menyaksikan sendiri kemampuan anak-anaknya, para orang tua tersebut pasti merasa bangga bahwa putera-puteri mereka dibimbing oleh orang-orang yang tepat.

Terinspirasi dan menginspirasi

Menjadi seorang pengajar, diakui Adit adalah sesuatu hal yang sangat ia nikmati. Peran tersebut memberi ruang baginya yang gemar berbicara di depan umum. Selain itu, ia juga bisa memenuhi panggilan hatinya sebagai seorang relawan. Membagikan ilmu dan pengetahuannya kepada mereka yang kekurangan dan sangat membutuhkan.

Saat ditanya mengenai tokoh-tokoh yang menginspirasi, mata Adit nampak berbinar. Ia mengaku sangat mengidolakan B. J. Habibie. Sejak kecil ia dibiasakan Ibunya menonton *Mbah Habibie* (cara orang tuanya memanggil Habibie) tiap muncul di layar kaca. Awalnya Adit kecil tidak paham maksud ibunya itu. Tapi lama-lama ia banyak belajar nilai-nilai yang terlihat dari apa yang dikerjakan idolanya tersebut. Sehingga dirinya termotivasi untuk dapat meniru teladannya tersebut. Menjadi seseorang yang berpengetahuan luas namun tetap rendah hati dan bermanfaat bagi banyak orang.

Aditya menyebut nama Anies Baswedan sebagai tokoh inspiratif kedua menurut dirinya. Sosok yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta ini sebelum terjun ke dunia politik memang dikenal sebagai cendekiawan muda yang peduli dunia pendidikan. Salah satu program yang menjadi *benchmark* keberhasilannya adalah Indonesia Mengajar.

Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pria yang hobi membaca buku ini makin semangat membagi ilmu. Fokusnya kini mengembangkan Serambi Inspirasi supaya menjadi lebih mandiri dalam aspek keorganisasian. Ke depannya dirinya juga berharap agar SI bisa mencakup lebih banyak wilayah, sehingga orang-orang yang merasakan manfaat dari program tersebut juga makin banyak.

"Sekarang SI sudah punya konsep yang jelas, *nih*. Kelas pengembangan karakter siswa-siswi di sebuah SD marjinal yang diadakan tiap hari Sabtu. Itu yang menjadi pembeda SI dengan program lain yang serupa," jelas Adit. Langkah tersebut diharapkan bisa lebih memudahkan jika program ini nantinya akan dibuka di kota-kota lain. Tinggal mengadaptasi konsep dan kurikulum yang telah dirancang dengan baik oleh tim di pusat.

Mengenai mimpi-mimpi lain di luar SI, dengan penuh semangat ia memaparkan visi yang ingin dicapainya dalam kehidupan di dunia. "Cita-cita saya adalah ketika dipanggil menghadap Tuhan, setidaknya ada 15 juta orang yang telah terinspirasi oleh apa yang saya lakukan," ucapnya tegas. "*Gak mungkin* langsung, ya. Setidaknya saya menginspirasi orang-orang di sekitar saya. Dari situ mereka dapat melanjutkannya dengan menginspirasi lebih banyak orang lagi!" tutupnya bersemangat.

Teks Dimach Putra

Motivasi Lewat Apresiasi



Foto
Arfindo
Briyan

Ada sebuah cerita nyata yang cukup menyentuh untuk direnungkan bersama. Cerita nyata ini saya dapat dari seseorang yang mungkin tidak pernah ada dalam benak kita. Seringkali kita menutup hadirnya sebuah hikmah baik hanya karena datang dari mulut yang tidak kita sangka untuk kita mintai hikmah. Hikmah ini saya dapat dari seorang *cleaning service*, sebut saja Kak Melati.

Sebagai pengantar, saya akan menceritakan sedikit sosoknya. Ia adalah pekerja yang rajin serta ramah. Meski pekerjaannya bisa dibilang tidak prestisius bagi sebagian orang, namun saya melihat binar-binar di matanya. Binar itu seakan menunjukkan betapa senang dan bangganya ia terhadap pekerjaan yang ia pilih sekarang.

Kembali ke Kak Melati, saya tidak menyangka, dibalik keceriaan dan semangatnya dalam bekerja, ia pernah mengalami masa-masa tidak menyenangkan. Satu tahun lalu ia bertugas di sebuah tempat yang baginya itu kenangan buruk. Alih-alih menyampaikan dengan baik, ada beberapa pihak yang menurutnya memiliki gaya komunikasi

menyakitkan. Akibat gaya komunikasi menyakitkan itu, berakibat pada motivasi kerjanya. Ia bekerja dengan baik, namun tetap dibayangi ketakutan atas kritik tak beralasan.

Nasib membawanya ke jalan yang lebih baik, begitu tuturnya. Disaat energinya mulai habis termakan kritikan dan sikap yang jauh dari menghargai, ia dinyatakan pindah tugas. Di tempat baru inilah, Kak Melati merasakan bahwa keberadaanya ada dan dihargai. Meski ia seorang *cleaning service*, namun ia mendapatkan perlakuan yang sama baiknya dengan pegawai. Dan jangan salah, sikap menghargai yang dimaksudkan olehnya itu sama sekali tidak muluk, sangat sederhana. Mengatakan permissi saat ia sedang mengepel atau menyampaikan fakta daripada menyalahkan saat ada ruangan yang kotor, baginya itu sudah lebih dari cukup.

Berita baiknya, perubahan respons dari gaya komunikasi menyakitkan menjadi gaya komunikasi memberdayakan seperti ini bukan tidak ada artinya. Bukan hanya semangat bekerja Kak Melati bertambah, loyalitasnya pun meningkat. Lebih dari itu, kebanggaan dan hormatnya pada

orang yang ia layani, menjadikannya bekerja dengan senang hati dan berusaha menghasilkan pekerjaan yang sebaik-baiknya.

Benarlah pernyataan Cikgu Okina Fitriani, pakar psikologi yang populer dengan *Tranformational Behaviour Training*-nya, bahwa ada yang disebut dengan respons yang memberdayakan. Alih-alih menyampaikan respons yang melemahkan, sudah saatnya kita mulai belajar untuk membuat respons yang memberdayakan. Respons yang memberdayakan itu lahir dari semangat memperbaiki bukan mencela. Tegur perilaku-nya bukan karakteristik orangnya, katakan secara tepat apa kesalahan perilakunya, katakan padanya bahwa ia mampu membuat perubahan, tidak mengungkit kesalahan lalu dan tetap sayangi orang yang kita tegur. Jika kita bisa menerapkan seluruh kunci respons yang memberdayakan ini, yakinlah setiap orang di sekitar kita akan mampu bertumbuh menjadi lebih baik. Bahkan kita sendiri pun telah bertumbuh karenanya.

Teks Athiah Listyowati



Judul: Keluarga Cemara 1 dan 2
Pengarang: Arswendo Atmowiloto
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Kota Terbit: Jakarta
Deskripsi Fisik: Keluarga Cemara 1, 288 halaman / Keluarga Cemara 2, 344 halaman
ISBN: 9789792292633 / 9789792292640



Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

- Perpustakaan Kemenkeu
- Perpustakaan Kementerian Keuangan
- @kemenkeulib

www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

5 Buku Fiksi Terpopuler

- Si Juki : Lika Liku Anak Kos Faza Meonk
- Cinta 2 Kodi Asma Nadia
- Belajar Sains Untuk Anak Pintar : Bayangan di Kamar Tidur Susan Martineau
- Amelia : Serial Anak-anak Mamak Tere Liye
- A Very Yuppy Wedding 288 mg Ika Natassa

5 Buku Non-Fiksi Terpopuler

- Karena Kita Garda Kemenkeu
- The Digital Mindset Carol Ingle
- Cat Lover's Book: Segala Hal yang Perlu Kamu Ketahui untuk Merawat Kucing Yudhi Prayogo
- Anak Sehat 100 Solusi dr. Tiwi dr. I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi
- Akuntansi Forensik : Audit Investigatif Theodorus M. T

Nostalgia Keluarga Cemara

Sebelum menjadi tayangan sukses di televisi, Keluarga Cemara telah lebih dulu diangkat ke dalam novel cerita karya Arswendo Atmowiloto. Dalam edisi kali ini, sampul buku yang dikemas secara pop menjadikan Keluarga Cemara terlahir kembali. Dengan desain yang lebih segar, buku ini memberikan pesan kuat bahwa tulisannya dapat dinikmati oleh generasi muda. Dengan penulisan menggunakan font atau huruf yang cukup besar, penulis seolah ingin menyimpan memori kekuatan cerita dalam naskah aslinya. Font besar ini merupakan ciri khas buku cerita pada era tahun 1980 yang dilengkapi dengan lukisan tangan dan huruf San-serif (tidak memilki garis kecil pada setiap akhir huruf).

Novel yang sangat sederhana ini ditulis menggunakan gaya bahasa yang sederhana pula. Pembaca pun akan dengan mudah memahami setiap cerita yang dikisahkan dalam novel setebal ratusan halaman yang terbagi dalam dua seri. Buku ini memiliki beberapa judul sehingga membuat alur cerita sering berpindah. Meskipun demikian, di setiap akhir cerita selalu memiliki kesamaan nilai moral yang terangkum. Salah satu nilai kebaikan yang tersirat yaitu kebahagiaan tidak datang dari banyaknya harta yang dikumpulkan ataupun cita-cita yang terwujud. Lebih jauh, kebahagiaan berasal dari hati yang senantiasa bersyukur dan dapat menerima keadaan dengan menerima segala kekurangan.

Sosok Abah yang santun dan bersahaja menjadi teladan bagi keluarganya. Walaupun hidup serba kekurangan, namun

Abah tetap memegang prinsip kejujuran dan selalu bekerja keras. Emak adalah seorang ibu yang menjadi panutan bagi anak-anaknya agar tetap patuh dan rukun serta mencintai keluarganya. Euis, putri pertama Abah, adalah anak pertama yang kuat, tegas, penuh semangat, dan disiplin. Ia sangat menyayangi adik-adiknya, rela melakukan apapun untuk adiknya. Cemara (Ara), anak kedua abah, adalah gadis yang lebih ceria dan polos. Ara memiliki mimpi begitu tinggi dan semangat untuk hidup lebih baik. Sifatnya selalu ceria dan pantang menyerah. Agil, putri abah paling kecil, adalah sosok yang centil, usil, menggemaskan, dan selalu ceria layaknya anak-anak kecil.

Novel ini terbagi menjadi dua seri, pada Keluarga Cemara 1 terdiri dari tiga judul: Hari Pertama, Musik Musim Hujan, dan Kupon Kemenangan. Selanjutnya Tidak kalah menarik dalam kisah di Keluarga Cemara 2 yang terdiri dari tiga judul: Tempat Minum Plastik dari Toko, Becak Emak, dan Bunga Pengantin.

Bersiaplah para pecinta dan penggemar serial sinetron Kelurga Cemara karena sebentar lagi kesuksesan film ini pada masanya akan diangkat ke layar lebar (bioskop) pada pertengahan tahun 2018. Sosok Abah “Adi Kurdi”, Emak “Novia Kolopaking”, Euis (Ceria Hade), Cemara “Ara” (Anisa Fujianti), dan Agil (Pudji Lestari) akan hadir dalam pemeran baru dan tentunya disesuaikan dengan zaman sekarang tanpa mengurangi nilai kebaikan pada film terdahulu.

Peresensi: Krishna Pandu Pradana



Anak-anak
Tulehu berlatih
sepakbola

Kampung Sepakbola Tulehu: Pencetak Pemain Handal

Sepakbola menjadi olahraga terpopuler di dunia. Saat ini, sepakbola bukan hanya sebuah pertandingan namun juga penghasil devisa negara. Brazil menjadi salah satu negara pencetak pemain sepakbola andal seperti Neymar, Coutinho, dan Ronaldo. Sepakbola menjadikan Brazil sebagai eksportir pemain sepakbola andal.

Indonesia sendiri mempunyai Kampung Sepakbola Tulehu yang terletak di Maluku Tengah. Jarak Tulehu dari Kota Ambon, ibukota Maluku, kurang lebih 24 kilometer. Untuk menuju kesana, saya harus menempuh kurang lebih satu jam perjalanan berkendara. Matahari di sepanjang perjalanan cukup menyengat. Namun, jalan yang kamialui mulus dan lancar. Kadang lurus memanjang, kadang naik turun dan berbelok-belok dengan pemandangan pesisir pantai di salah satu sisi jalan.

Kelengangan jalan dan cerita pengemudi mobil tentang Ambon membuat perjalanan menjadi tidak terasa. Akhirnya di sebuah pertigaan saya menemui tugu besar bertuliskan “**Selamat Datang di Kampung Sepakbola Tulehu**”. Penduduk kampung ini memang dikenal gila bola. Anak-anak kecil bahkan banyak yang sudah memiliki seragam pemain kesukaan masing-masing.

Dengan penuh rasa ingin tahu, saya pun langsung bergegas mencari lapangan Mutuwaru. Konon, lapangan ini dianggap keramat karena selama puluhan tahun menjadi tempat berlatih anak-anak Tulehu yang kelak menjadi pemain bola nasional.

Sudah menjadi tradisi untuk mengenalkan anak-anak dengan suasana lapangan Mutuwaru sejak dini. Bayi yang baru lahir wajib menginjakkan kaki di lapangan Mutuwaru. Tak jarang orang tua menonton pertandingan sepakbola di sini sambil menggendong bayinya.

Lapangan Mutuwaru tak hanya dikelilingi perkampungan warga tetapi juga pemakaman muslim yang menjadikan kesan keramat semakin kuat. Sebagai sebuah negeri, Tulehu memang merupakan komunitas Islam tua yang di masa lalu menjadi bagian dari kerajaan besar Islam Tanah Hitu. Di beberapa sudut lapangan saya menemui sapi-sapi yang tengah merumput, lengkap dengan kotorannya.

Kampung Tulehu diresmikan sebagai Kampung Sepakbola oleh Menteri Pemuda dan Olahraga pada tahun 2015. Kampung ini juga sering dijuluki sebagai “Kampung Brazil” karena mencetak banyak pemain nasional. Nama Imron Nahumarury, Rizky Pellu, dan Ramadani Lestahu adalah bukti nyata budaya sepak bola di Kampung Sepak Bola Tulehu.

Para pemain sepakbola nasional tersebut tidak pernah mengenyam sekolah sepak bola, seperti anak-anak di kota besar. Kegemaran warga bermain bola sejak kecil diwariskan secara turun-temurun begitu saja. Sayangnya, lapangan tempat mereka berlatih jauh dari layak. Belum lagi sarana pendukung wajib latihan seperti bola dan sepatu.

Saya kemudian berpikir, Dana Desa yang disalurkan pemerintah semestinya bisa digunakan untuk menyediakan fasilitas berlatih sepakbola yang memadai. Jika lapangan bola yang ada lebih terawat, anak-anak Kampung Tulehu akan benar-benar dapat mengasah bakat yang mereka miliki.

Kampung Tulehu bahkan bisa membuat lapangan bola baru sehingga penggunaannya tidak harus bergiliran. Artinya, kesempatan anak-anak Tulehu untuk berlatih, bermain, dan berkompetisi dengan maksimal akan semakin banyak. Apalagi, modal dasar akan bibit pemain sepakbola seakan tidak pernah habis di sini. Tidak menutup kemungkinan akan lahir generasi baru pemain berbakat lainnya.

Teks dan foto M. Ardhani, Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Seni Peran dan Komunikasi



Konsistensi dalam menekuni seni peran menjadikan Reza Rahardian, atau akrab disapa Reza, menghasilkan suatu karya film yang mampu menghipnotis setiap penontonnya. Lebih dari itu, berkat kemampuan aktingnya yang mumpuni, ia didapuk sebagai aktor seribu wajah. Sebut saja deretan film dengan beragam kepribadian yang pernah ia bintang, seperti film nasionalis-teknokrat di Kartini dan Guru Bangsa: Tjokroaminoto; film romantis Habibie dan Ainun, Critical Eleven, dan Perempuan Berkalung Sorban; film fiksi-supernatural Firegate, bahkan film komedi seperti My Stupid Boss, dan teranyar Benyamin Biang Kerok, serta masih sangat banyak lagi lainnya.

“Saya senang belajar tentang kepribadian orang lain. Saya senang mempelajari kehidupan orang lain karena esensinya menjadi seorang aktor adalah menyampaikan cerita ulang atau merekonstruksi sebuah kehidupan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi itu tugas utama seorang aktor sebenarnya. Jadi, kita itu menjadi *story teller*-nya dalam sebuah film. Saya harus mampu menyampaikan sesuatu. Kalau saya *gak* menguasai materinya, saya tidak menguasai tokoh yang akan saya sampaikan secara karakter,” cerita Reza.

Terkait tips menjadi pekerja seni peran yang sukses, kepada para pemain baru, Reza berpesan agar mereka mencintai pekerjaan yang telah mereka

pilih. Dengan begitu, mereka akan mampu bekerja dan belajar secara totalitas, baik untuk mempelajari teori-teorinya, maupun mempelajari kehidupan karakter yang akan dibawakan. “Tiba-tiba saya dapat peran jadi Menteri Keuangan nih misalnya, ya pasti saya mau belajar sama Ibu Sri Mulyani, siapa lagi gitu kan. Saya ingin tahu bagaimana Ibu menghadapi masalah dalam sebuah *meeting* terkait keuangan gitu, atau bagaimana Ibu berbicara tentang APBN dan lain-lain *kan* saya perlu tau *dong*. Otomatis saya harus belajar tentang itu,” jelasnya.

Lebih jauh, Reza menganggap bahwa ada korelasi yang kuat antara seni peran dengan komunikasi. Profesi aktor menjadikan dirinya harus bisa bersikap sebagai tokoh publik yang secara langsung ataupun tidak akan dapat memberikan pengaruh ke masyarakat. Sadar akan hal tersebut, Reza merasa perlu untuk tidak hanya memberikan yang terbaik di

bidang seni perannya, namun juga hal-hal di luar seni peran yang bisa dilakukan untuk masyarakat. Dalam hal ini, ia sangat mendukung pola komunikasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.

“Kalau berbicara tentang kebijakan publik, misalnya tentang kebijakan publik dari Kemenkeu seperti perpajakan. Saya sadar saya juga merupakan wajib pajak dan saya membayar pajak dari penghasilan yang saya dapat. Sebagai warga negara, pajak itu memang sudah menjadi kewajiban. Bahwa kemudian kita harus mencari tahu lebih banyak tentang apa sih fungsi pajak, maka pelajailah itu, cari tau, berita udah banyak, mau bayar pajak sekarang sudah bisa diakses *online*, ada *e-filing*, ada berbagai macam hal yang mempermudah wajib pajak hari ini untuk kemudian membayarkan utang pajak,” ungkapnya dengan optimis.

Teks Abdul Aziz

Mas Praim

Cerita : Dimach

Gambar : Bimo Adi



MEMPERINGATI HARI NELAYAN NASIONAL
06 APRIL 2018



Foto
Arfindo Briyan S.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA